

PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTIKORUPSI



DIREKTORAT PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

 www.kpk.go.id  permaskpk@kpk.go.id

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTIKORUPSI



PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTIKORUPSI



DIREKTORAT PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

BERANTAS
KORUPSI



PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTIKORUPSI



DIREKTORAT PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTIKORUPSI

Euis Sunarti
Aliya Faizah Fithriyah
Winny Novyanti



Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi, Jakarta 12950

C.01/11.2021

Judul Buku:
Peran Perempuan Dalam Gerakan Antikorupsi

Penulis:
Euis Sunarti
Aliya Faizah Fithriyah
Winny Novyanti

Supervisi:
Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi
Ariz Dedy Arham
Rommy Iman Sulaiman
Herlina Jeane Aldian

Editor:
Tania Panandita & Dwi M Nastiti

Ilustrasi:
Army Trihadi Putra

Desain Sampul & Penata Isi:
Makhsud Khoirul Fahmi & Andreas Levi Aladin

Jumlah Halaman:
135 + 7 hal romawi

Edisi/Cetakan:
Cetakan 1, November 2021

Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi, Jakarta 12950
E-mail: permaskpk@kpk.go.id
www.kpk.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi, Jakarta 12950
www.kpk.go.id

ISBN: 978-602-9488-22-7

Dicetak oleh Percetakan :



PT Penerbit IPB Press
Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp. 0251 - 8355 158
E-mail: penerbit.ipbpress@gmail.com
www.ipbpress.com
Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

© 2021, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Untuk tujuan pendidikan antikorupsi non komersial, diperbolehkan mengutip isi buku
dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemerdekaan Indonesia yang telah diraih sejak 76 tahun yang lalu diharapkan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negara. Pemerintah mempunyai peran dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sementara itu, tindak pidana korupsi terus terjadi dan ini merupakan sebuah pengkhianatan bagi amanat bangsa. Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri tegak menjadi pengawas sekaligus pengawal keberlangsungan tata negara untuk menjaga pengelolaan sumber daya yang ada demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya peran serta masyarakat. “Lihat, Lawan, Laporkan” tidak boleh hanya sekadar menjadi slogan, namun harus menjadi aksi nyata bersama dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK menyadari bahwa ada berbagai elemen penting yang harus diberdayakan dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya yaitu peran perempuan Indonesia. Perempuan memiliki berbagai peran dalam hidupnya di antaranya sebagai diri sendiri, anak, istri, ibu, peer group, sejawat di lingkungan kerja, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia itu sendiri. Selain itu, perempuan di Indonesia menduduki hampir setengah dari populasi, maka dengan jumlah tersebut tentunya peran perempuan menjadi sangat signifikan dan akan berpengaruh dalam merubah tatanan kehidupan yang berbudaya di masyarakat. Dengan pandangan tersebut maka buku berjudul Peran Perempuan dalam Gerakan Antikorupsi ini dibuat.

Buku ini telah dirangkai dengan apik dan didukung oleh data-data serta sumber-sumber yang kredibel untuk menyuguhkan bahan bacaan tentang pentingnya peran perempuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan sekaligus dapat menjadi pedoman bagaimana cara untuk berperan serta secara aktif dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi bekal untuk memulai aksi “Lihat, Lawan, Laporkan!”.

Jakarta, Oktober 2021

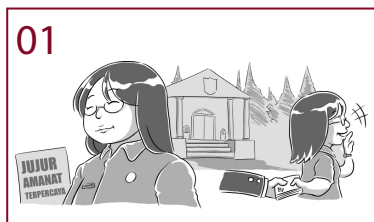
Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v

Daftar isi vi

01



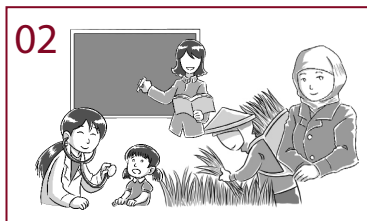
BAB 1

ANTARA REALITA

DAN IDEALITA 1

1. Amanat Luhur
Kemerdekaan 3
2. Landasan Filosofi
dan Agama 6
3. Fakta Berbicara 9
4. Realita di Sekitar Kita 21
5. Korupsi, Kemiskinan,
dan Wajah Perempuan 25
6. Rumusan Masalah 27
7. Tujuan dan Kerangka
Isi Buku 29
8. Manfaat Bagi Pembaca 31

02



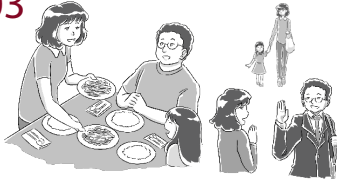
BAB 2

MENJADI PEREMPUAN

MULIA BERINTEGRITAS 33

1. Eksistensi Diri Perempuan 35
2. Ragam Peran Perempuan 37
3. Menjadi Aku dan Diriku 43
4. Perkembangan Moral 45
5. Perkembangan Kognitif 49
6. Perkembangan
Psikososial 51
7. Menjadikan
Seorang "Empu" 56

03



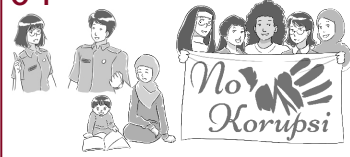
BAB 3

PERAN PEREMPUAN
WUJUDKAN KELUARGA

ANTIKORUPSI 59

1. Kesiapan Perempuan Berkeluarga.....61
2. Internalisasi Nilai Antikorupsi di Keluarga 65
3. Tingkatan Output Internalisasi Nilai Antikorupsi 67
4. Mekanisme Internalisasi Nilai Antikorupsi 69
5. Efektivitas Proses Internalisasi.....71
6. Nilai Antikorupsi.....71
7. Persepsi Antikorupsi Perempuan 73
8. Kerangka Kerja Perempuan Bangun Keluarga Antikorupsi 78

04



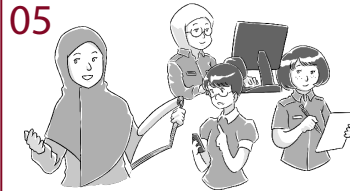
BAB 4

PERAN PEREMPUAN
BANGUN BUDAYA

ANTIKORUPSI 83

1. Budaya Antikorupsi 85
2. Peran Perempuan dalam Membangun Budaya Antikorupsi 91

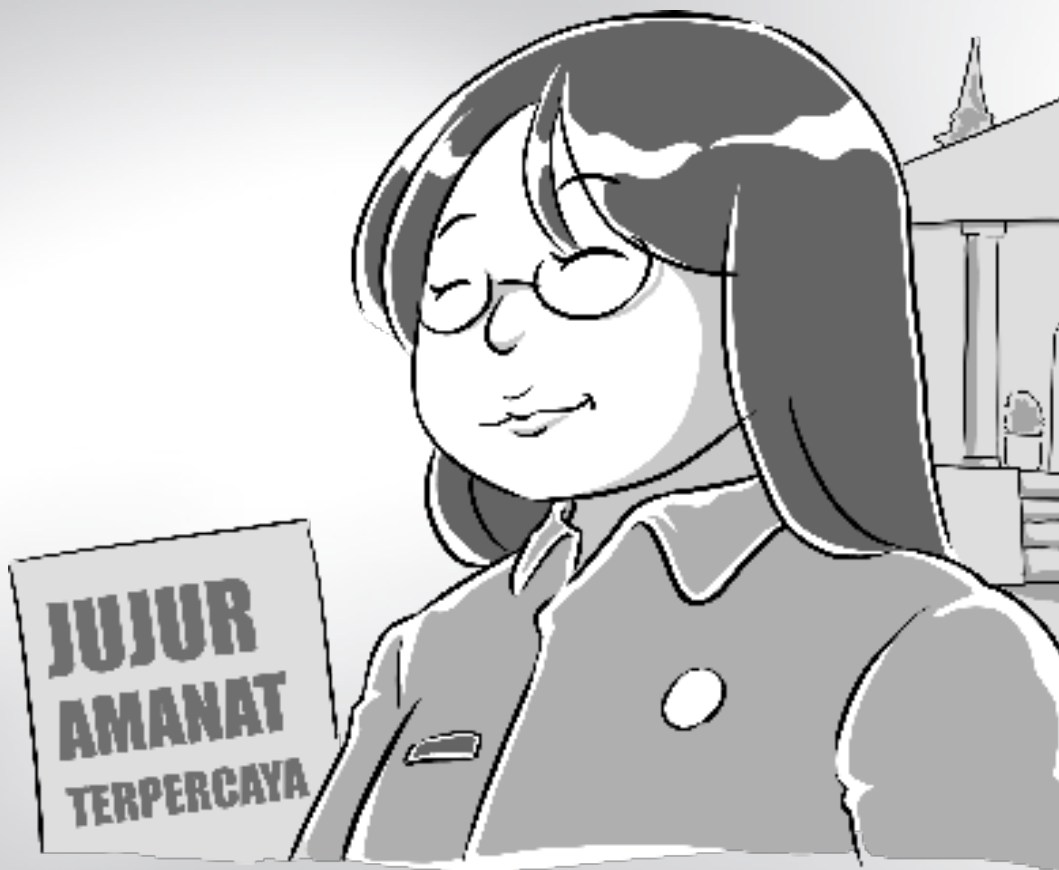
05



BAB 5

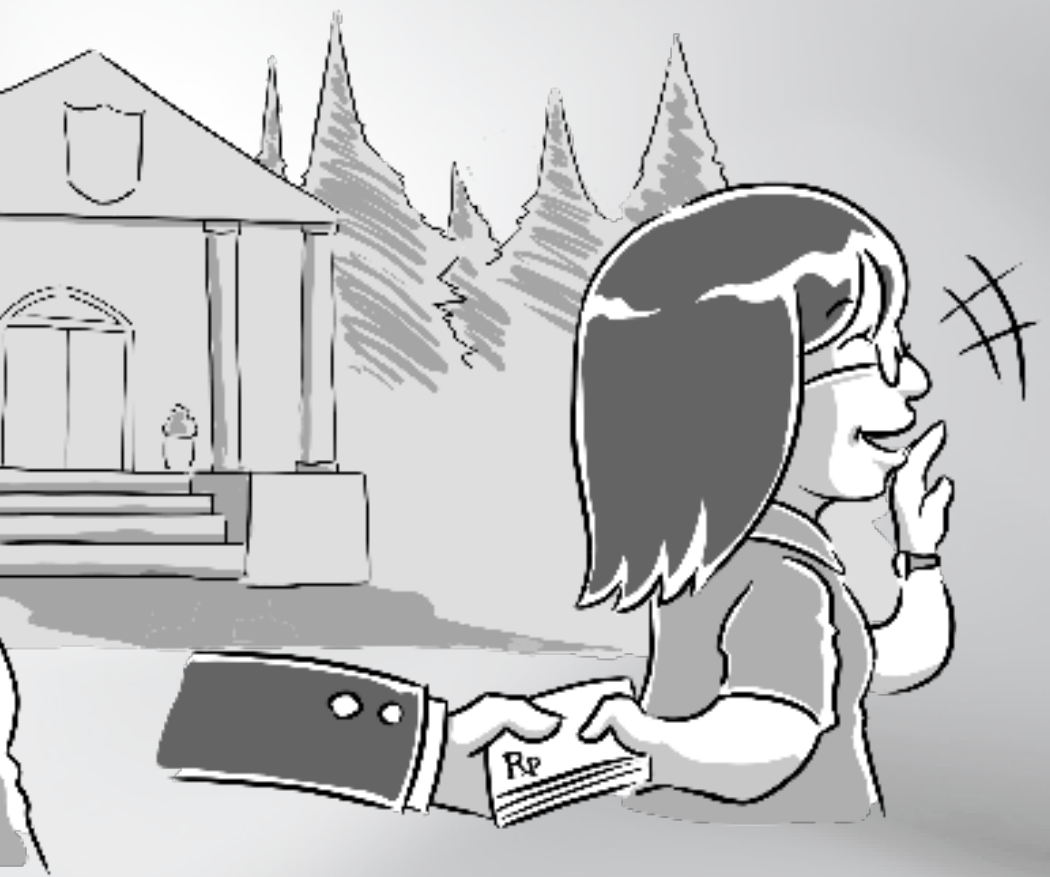
PILIHAN AKSI..... 107

1. Kerangka Kerja Pilihan Aksi Pemberantasan Korupsi 109
2. Pilihan Aksi Perempuan Bangun Budaya Antikorupsi 119



BAB 1 ANTARA REALITA DAN IDEALITA

Salah satu cara mempertahankan pembahasan isu korupsi sebagai permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa adalah dengan senantiasa mengingatkan kondisi ideal dan realita yang diakibatkannya. Gap antara kondisi ideal dan realita, itulah yang menjadi sasaran



pemberantasan korupsi di Indonesia. Absennya korupsi merupakan kondisi ideal yang dikehendaki dan diharapkan. Korupsi menyebabkan gangguan besar dalam pencapaian tujuan pembangunan yaitu menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Korupsi menjauhkan tujuan kemerdekaan yaitu kemakmuran bangsa Indonesia. Untuk itulah seluruh komponen bangsa perlu terjun berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, tak terkecuali perempuan yang jumlahnya hampir setengah penduduk Indonesia.

1. Amanat Luhur Kemerdekaan

Berbagai kejadian korupsi sudah seharusnya membuat semua warga negara baik pria maupun wanita, tua maupun muda, di mana pun berada di desa maupun di kota, bukan hanya sebatas merasa prihatin, namun hendaknya mau berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan kapasitasnya. Pemberantasan korupsi sangat penting karena perilaku koruptif dan kejahatan korupsi menjauhkan kita dari tujuan kemerdekaan.

Kemerdekaan Indonesia diharapkan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negara. Amanat kemerdekaan tersebut tertuang dalam pembukaan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada alinea kedua terkandung makna bahwa kemerdekaan Indonesia mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Makmurnya seluruh warga negara Indonesia adalah cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia.

“Lantas bagaimana kondisi kemakmuran bangsa Indonesia setelah 76 tahun merdeka?”

Pemerintah mendapat amanah untuk mengelola sumber daya pembangunan, terutama sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara. Sayangnya kejahatan korupsi yang dilakukan berbagai pihak masih terus mewarnai, merugikan dan mengganggu pelaksanaan serta pencapaian tujuan pembangunan.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan koruptor adalah pengkhianat amanat kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, bukan hanya penyelenggara negara, namun juga seluruh warga negara, tua-muda, laki-laki dan perempuan, dengan profesi apapun, seharusnya turut mengemban amanat kemerdekaan dengan berpartisipasi memberantas korupsi karena menjauhkan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan koruptor adalah pengkhianat amanat kemerdekaan Indonesia."





2. Landasan Filosofi dan Agama

Pemberantasan korupsi dilandasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan sila pertama pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama-agama yang diakui negara dan dianut penduduk Indonesia memiliki kesamaan, yaitu:

Melarang perbuatan buruk, korupsi yang disebabkan oleh ketidakjujuran, berbohong, mencuri, dan mengambil hak orang lain.

1. Islam

Beberapa ayat Al-Qur'an yang melarang perilaku koruptif, yaitu larangan memakan harta yang batil dan larangan mencuri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."
QS. An-Nisa Ayat 29

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٣٨

Artinya:

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."
QS. Al-Maidah Ayat 38

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ١٨٨

Artinya:

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."
QS. Al-Baqarah Ayat 188

2. Kristen

Alkitab keluaran 20:15, Allah berfirman: Jangan mencuri, demikian jelasnya larangan Tuhan untuk tidak mencuri. Sementara itu, korupsi adalah mencuri dengan cara yang tidak diketahui secara langsung, dengan cara diam-diam, dan halus. Merugikan Negara dan orang lain demi kepentingan pribadi.

3. Hindu

Kepercayaan akan Panca Ma (penyebab nokta hitam moral), yaitu madat (narkoba), mamunyah (mabuk), mandom (zina), mamotoh (judi), dan mamaling (mencuri/korupsi). Pelaku mamaling (korupsi) akan dikenakan sanksi hukuman mati. Sanksi tersebut diberlakukan sejak Ratu Shima memerintah Kalijangga di Jawa Tengah 632 masehi.

4. Budha

Dalam agama Budha korupsi didasari oleh keserakahan dan berakar pada kebodohan batin. Korupsi termasuk melanggar Aturan-moralitas Buddhis (sila) ke-2 mengambil barang yang tidak diberikan pemiliknya dan akan mengondisikan seseorang melanggar Aturan-moralitas Buddhis (sila) ke-4 buddhis (menahan diri dari ucapan yang tidak benar atau berbohong) dikarenakan ketika seseorang melakukan korupsi ia telah 'mencuri' dan akan mengondisikannya berbohong untuk menyembunyikan perbuatannya. Jadi korupsi bisa membuat seseorang melanggar Aturan-moralitas Buddhis (sila) ke-2 dan Aturan-moralitas Buddhis (sila) ke-4 dari Lima Aturan-moralitas Buddhis (panca-sila). Sehingga menurut Buddhisme, korupsi merupakan sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan karena telah melanggar Aturan-moralitas Buddhis (sila).

5. Katolik

Kitab Suci Perjanjian Lama dengan tegas melarang mencuri. "Jangan mencuri!" (Kel. 20:15) adalah kehendak Allah yang kemudian dikenal sebagai Perintah Allah yang ketujuh dalam Gereja Katolik. Perintah ini ditegaskan juga dalam Perintah Allah kesepuluh "Jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil". Selain mencuri, suap sebagai bagian dari korupsi yang mendatangkan keuntungan pribadi sehingga pihak lain dirugikan, juga dengan tegas dilarang dalam Kitab Keluaran, "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar" (Kel. 23:8).

6. Konghucu

Bila seorang raja bertanya: "Apakah yang dapat menguntungkan negeriku?" Maka para pejabat akan bertanya: "Apakah yang dapat menguntungkan keluargaku?" dan rakyatpun akan bertanya: "Apakah yang dapat menguntungkan diriku?" Bila yang berkedudukan tinggi maupun rendah hanya berebut keuntungan niscaya negara berada dalam keadaan bahaya (Mengzi 1A:4).

Seluruh agama yang sah diakui oleh negara dan dianut oleh seluruh penduduk Indonesia, memiliki landasan yang sama melarang perilaku yang mendasari perilaku korupsi. Dengan demikian, seluruh agama mendukung dan mendorong pemberantasan korupsi.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi :

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Selama 2020, ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat, ada 444 kasus korupsi yang telah ditangani lembaga penegak hukum dengan 875 tersangka dan negara telah dirugikan hingga Rp18,6 triliun.

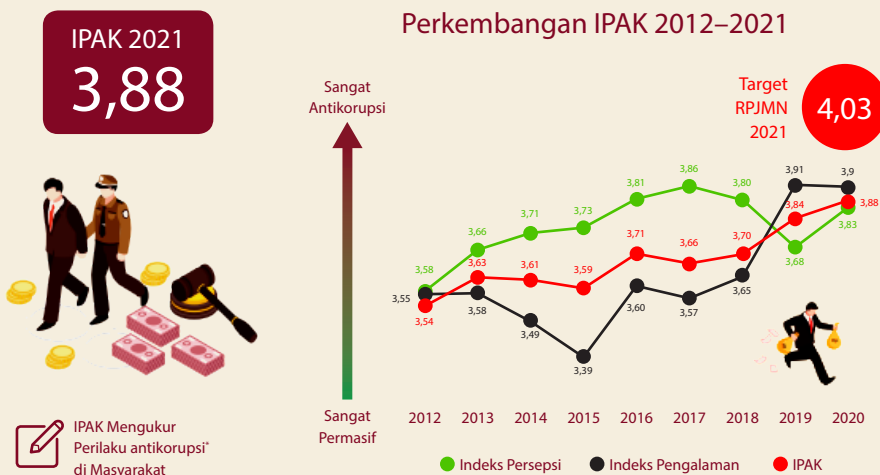
3. Fakta Berbicara

Sejarah menunjukkan bahwa larangan korupsi dan upaya pemberantasannya telah dilakukan sejak lama. Penelusuran dokumen menemukan bahwa sejak tahun 1957 terdapat aturan yang bersifat terbatas, yaitu pemberantasan korupsi yang dibuat di lingkungan penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Berdasarkan

Keberhasilan upaya pemberantasan korupsi salah satunya diukur dari IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi). IPAK Tahun 2021 sebesar 3,88 (dari nilai tertinggi 5,0). Persepsi masyarakat terkait perilaku antikorupsi dari pengalaman publik dan dalam kehidupan keluarga cukup tinggi yaitu nilainya lebih dari 4,0.

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2021

Berita Resmi Statistik No. 46/06/Th. XXIV, 15 Juni 2021

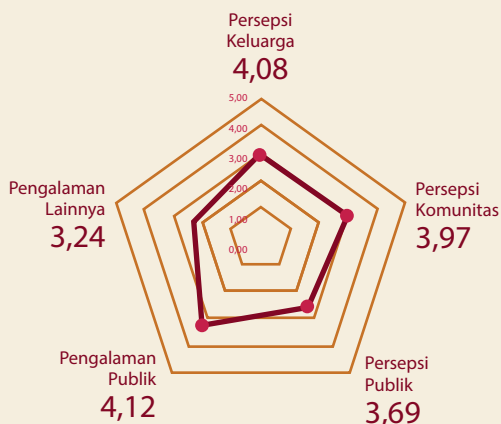


IPAK 2021 MENURUT DIMENSI



Keterangan:
*Cakupan dalam IPAK adalah petty corruption

IPAK 2021 MENURUT SUB DIMENSI



BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

Di tingkat global, terdapat penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada Tahun 2019 IPK Indonesia sebesar 40, lebih rendah dari nilai rata-rata negara di Kawasan Asia Pasifik (rata-rata indeks 45) dan IPK Global (rata-rata indeks 43).

**Pada Tahun 2020
IPK Indonesia menurun
dari 40 menjadi 37.**

Hal ini menggeser peringkat Indonesia yang semula peringkat negara ke-85 menjadi peringkat negara ke-102 dari 180 negara yang diukur IPK-nya. Indeks persepsi korupsi (IPK) lahir dari indeks gabungan atas 13 survei global, 9 di antaranya melakukan pengukuran di Indonesia, yaitu¹:

1. **Economist Intelligence Unit (Country Risk Rating)** yang banyak menyoroti tentang akuntabilitas dana publik, penyalahgunaan dana publik, pendanaan khusus yang tidak akuntabel, rekrutmen PNS, independensi badan audit, independensi peradilan, dan kebiasaan suap untuk kontrak;
2. **International Country Risk Guide**, menilai suap terkait dengan izin ekspor-impor, kontrol perdagangan, penghitungan pajak, perlindungan oleh polisi dan pinjaman, serta potensi atau korupsi aktual dalam bentuk kronisme, nepotisme, pendanaan rahasia, serta kedekatan politik dan bisnis;
3. **World Economic Forum/ Executive Opinion Survei**, yang menyelidiki tentang seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan suap terkait dengan ekspor-impor, fasilitas publik, pembayaran pajak tahunan, kickback kontrak, serta seberapa lazim dana publik dialihkan ke swasta, individu, atau kelompok terkait dengan korupsi;
4. **Bertelsmann Transformation Index** tentang efektivitas pemidanaan tipikor pada pejabat publik serta kesuksesan mengontrol korupsi dan efektivitas penegakan integritas;
5. **IMD World Competitiveness** yang menyoroti eksistensi suap dan korupsi;

¹ Transparansi Internasional Indonesia (TII)

6. **Global Insight (Country Risk Rating)** yang berbicara tentang korupsi dan dampaknya terhadap operasionalisasi bisnis serta asesmen pengalaman pebisnis dalam proses perizinan dan regulasi pendukung;

7. **Political Economic Risk Consultancy (PERC)** tentang persepsi korupsi sektor publik; (a) pimpinan politik nasional dan lokal, (b) persepsi korupsi pada instansi tertentu: kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perizinan, pengawasan, militer;

8. **World Justice Project** yang berbicara dalam hal mengukur ketaatan suatu negara dalam penegakan hukum serta mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun polisi/militer;

9. **Varieties Democracy Project** yang mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara, yakni elektoral, liberal, partisipatif, deliberatif, egalitarian, majoritarian, dan konsensual.



Perkembangan IPAK menurut Karakteristik, 2020–2021

Karakteristik	2020	2021	Sangat Antikorupsi	5
(1)	(2)	(3)		
Wilayah				
Perkotaan	3,87	3,92		4
Perdesaan	3,81	3,83		
Pendidikan Tertinggi				3
Di Bawah SLTA	3,80	3,83		2
SLTA	3,88	3,92		
Di Atas SLTA	3,97	3,99		1
Kelompok Umur				0
Di Bawah 40 Tahun	3,85	3,89		
40–59 Tahun	3,84	3,88		
60 Tahun ke Atas	3,82	3,87	Sangat Permasif	

Sumber:

Diolah dari data Survei
Perilaku Anti Korupsi
(SPAK), 2020–2021

Membandingkan indikator IPAK tahun 2020 dan 2021² menurut kelompok masyarakat berdasarkan wilayah tempat tinggal (perkotaan atau perdesaan), berdasarkan pendidikan (di bawah SLTA, SLTA, di atas SLTA) dan berdasarkan kelompok umur (di bawah 40 tahun, antara 40–59 tahun, dan di atas 60 tahun) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persepsi antikorupsi di kalangan masyarakat Indonesia.

Secara sederhana masyarakat luas menilai upaya dan keberhasilan pemberantasan korupsi dari berbagai kejadian korupsi yang mewarnai berbagai berita dan pengalaman yang terekam, baik pengalaman sendiri maupun orang-orang di sekelilingnya.

² BPS. 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2021

Hal tersebut dipersepsikan dan menjadi ukuran penilaian pemberantasan korupsi. Data perbandingan IPAK Tahun 2020 dengan Tahun 2021 terlihat peningkatan indeks persepsi antikorupsi sebesar 0,02 sampai 0,05.

“Namun apakah peningkatan tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan?”

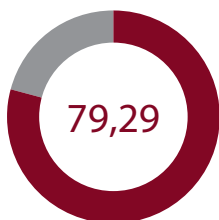
Perlu dianalisis lebih lanjut dan diperbandingkan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pemberantasan korupsi, khususnya dalam upaya pendidikan antikorupsi.

Persepsi antikorupsi dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti persepsi ketidakwajaran berbagai perilaku yang menjurus maupun yang jelas menunjukkan perilaku korupsi. Hasil survei menunjukkan lebih dari 79% masyarakat yang disurvei memandang tidak wajar terhadap sikap atau perilaku kelompok masyarakat yang membantu membagikan

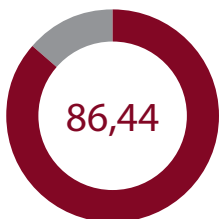
uang atau fasilitas dan peserta pilkades/pilkada/pemilu, menerima hibah atau sumbangan tanpa mempertanyakan asal-usulnya, tetap membela mantan pejabat pelaku korupsi yang ketika menjabat sering membagikan bantuan dan terhadap aparat pemerintah yang mengusulkan perolehan bantuan bagi warga yang tidak memenuhi kriteria bantuan.



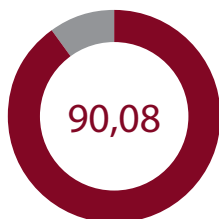
Persentase Sikap Masyarakat
yang Menganggap Tidak Wajar Beberapa Kebiasaan
di Lingkungan Komunitas, 2021



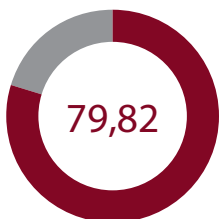
Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap kelompok masyarakat/RT/RW membantu membagikan uang/barang/fasilitas dari peserta pilkades/pilkada/pemilu kepada warga/anggota kelompok sebesar 79,29 (2021).



Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap kelompok masyarakat/RT/RW menerima bantuan/sumbangan/pemberian/hibah dari seorang tanpa mempertanyakan asal-usulnya sebesar 86,44 (2021).



Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar mantan pejabat pemerintah yang sering membagikan santunan/bantuan/sumbangan tetap dibela masyarakat meskipun masih terlibat kasus korupsi sebesar 90,08 (2021).



Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar ketua RT/RW/Kades/Lurah mengusulkan semua/sebagian besar warganya untuk mendapatkan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin meskipun tidak sesuai kriteria sebesar 79,82 (2021).

Sumber:

Diolah dari data Survei
Perilaku Anti Korupsi
(SPAK), 2020–2021

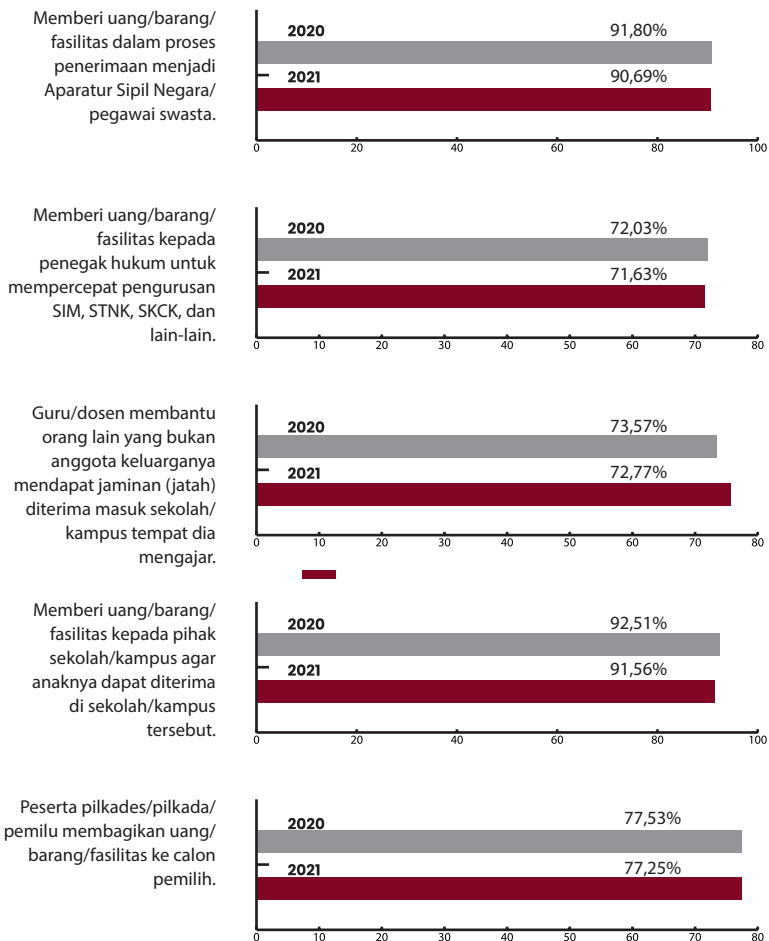
Sebesar 72% masyarakat yang disurvei memiliki nilai antikorupsi pada empat indikator ketidakwajaran kebiasaan di lingkup publik.

Perilaku antikorupsi masyarakat lainnya yaitu pandangan ketidakwajaran terhadap kebiasaan di lingkup publik yang menunjukkan nilai ketidakjujuran, suap, dan curang. Hasil survei menunjukkan lebih dari 72% masyarakat yang disurvei memiliki nilai antikorupsi pada empat indikator ketidakwajaran kebiasaan di lingkup publik. Data tahun 2021 menunjukkan terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Masih terdapat 28% yang tidak memandang ketidakwajaran terhadap kebiasaan tidak jujur, suap, dan curang di lingkup publik merupakan tantangan besar pemberantasan korupsi.

Sebesar 74% masyarakat memiliki kesadaran dan sensitivitas akan sikap dan/atau perilaku yang tidak wajar dalam lingkup keluarga tersebut.

Perilaku antikorupsi penting lainnya bagi masyarakat yaitu pandangan ketidakwajaran terhadap kebiasaan di lingkup keluarga yang menunjukkan nilai ketidakhati-hatian, ketidakwaspadaan, mengambil barang atau uang tanpa izin, menerima dana dari sumber yang tidak jelas dan penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Hasil survei Tahun 2021 menunjukkan minimal 74% masyarakat memiliki kesadaran dan sensitivitas akan sikap dan atau perilaku yang tidak wajar dalam lingkup keluarga tersebut. Angka tersebut mengalami sedikit peningkatan dari Tahun 2020.

Persentase Sikap Masyarakat yang Menganggap Tidak Wajar Beberapa Kebiasaan di Lingkup Publik, 2020–2021

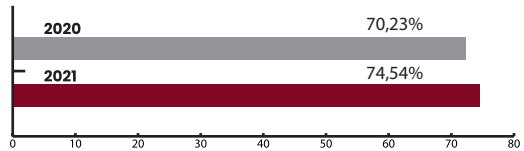


Sumber:

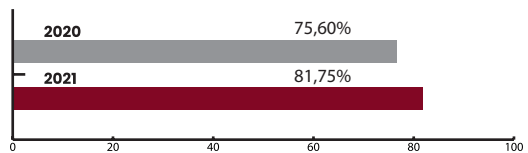
Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021

Persentase Sikap Masyarakat yang Menganggap Tidak Wajar Beberapa Kebiasaan di Lingkup Keluarga, 2020–2021

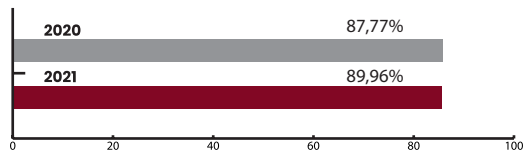
Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami, di luar gaji/penghasilan yang biasa diterima, tanpa mempertanyakan asal-usul uang tersebut meningkat dari 70,28 (2020) menjadi 74,54 (2021).



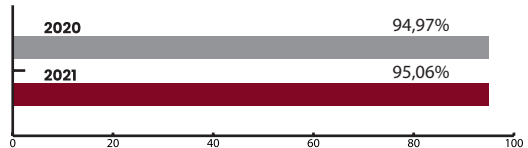
Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga meningkat dari 76,60 (2020) menjadi 81,75 (2021).



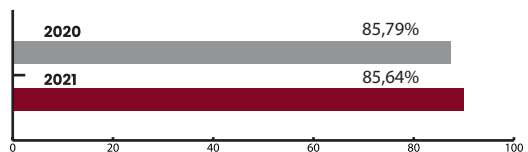
Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap orang tua mengajak anaknya dalam kampanye pilkades/pilkada/pemilu demi mendapatkan uang lebih banyak meningkat dari 87,47 (2020) menjadi 89,96 (2021).



Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap seseorang mengambil uang milik anggota keluarga sendiri tanpa seizin pemiliknya meningkat dari 94,97 (2020) menjadi 95,06 (2021).



Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap seseorang menggunakan barang milik anggota keluarga sendiri tanpa seizin pemiliknya sedikit menurun dari 85,79 (2020) menjadi 85,64 (2021).



Sumber:

Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021

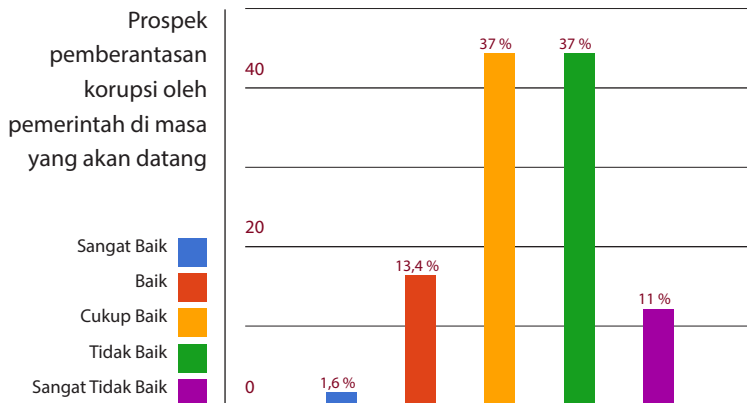
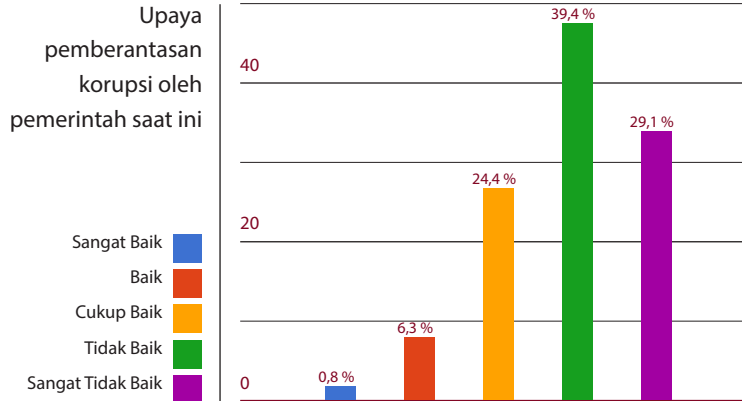
Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai korupsi dan menolak korupsi, serta tentunya meningkatnya harapan efektivitas pemberantasan korupsi.

Hasil survei IPAK menunjukkan adanya sedikit peningkatan persepsi antikorupsi di masyarakat. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai korupsi dan menolak korupsi, serta tentunya meningkatnya harapan efektivitas pemberantasan korupsi. Akibatnya masyarakat lebih menuntut peningkatan kinerja yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Hasil survei terbatas persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi mengonfirmasi hal tersebut.

Tim penulis juga melakukan survei mandiri dengan metode survei online yang diikuti oleh 127 orang (laki-laki dan perempuan) dengan usia berkisar 15 sampai 63 tahun dan dikumpulkan selama 4 hari pada akhir bulan Agustus 2021. Hasil survei tersebut dilakukan untuk melihat persepsi kecukupan upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah, saat ini menunjukkan cukup besar persentase responden yang menilai negatif (tidak baik dan sangat tidak baik). Demikian halnya dengan persepsi mengenai prospek pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah di masa yang akan datang. Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang dan yang akan datang sehingga semua komponen bangsa, termasuk perempuan hendaknya terdorong atau termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Anda, Bagaimana Pemberantasan Korupsi
di Indonesia?

(Pilihlah salah satu yang menurut Anda sesuai)



Data menunjukkan dari 1262 kasus korupsi yang ditangani KPK selama ini, sebanyak 116 (9,2%) koruptor perempuan.

4. Realita di Sekitar Kita

Pelaku korupsi tidak memandang latar belakang dan jenis kelamin. Masyarakat secara umum memperoleh berbagai informasi korupsi yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, data menunjukkan dari 1262 kasus korupsi yang ditangani KPK sampai bulan Juni Tahun 2021, sebanyak 116 (9,2%) koruptor berjenis kelamin perempuan. Bagaimana memaknai data tersebut, apakah data tersebut menunjukkan perempuan lebih memiliki perilaku antikorupsi? Atau karena perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk korupsi karena lebih sedikit menempati posisi jabatan publik? Tiga gambar kumpulan berita berikut menunjukkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan perempuan.





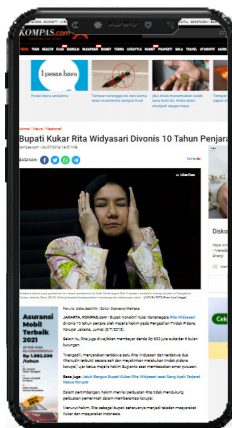
Masyarakat secara umum membaca bahwa pada dasarnya korupsi dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun yang membedakan adalah kesempatan, di mana laki-laki memiliki kesempatan lebih tinggi untuk korupsi, seiring lebih banyaknya jabatan publik yang dipegang laki-laki. Argumen tersebut didukung oleh fakta bahwa beberapa pejabat perempuan sebagaimana ditunjukkan dalam potongan berita, juga melakukan korupsi yang sama dengan laki-laki, manakala ada kesempatan.





Korupsi dapat dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Kasus korupsi Bantuan Sosial (dikenal Bansos) dan keterlibatan perempuan di dalamnya, juga menguatkan bahwa perilaku korupsi tidak mempertimbangkan dana peruntukan yang dikorupsi. Bantuan dan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan sosial, terlebih di kala pandemi, tidak menyurutkan niat dan menghentikan langkah para koruptor.





5. Korupsi, Kemiskinan, dan Wajah Perempuan

Pernakah para pembaca mendengar ungkapan bahwa

“Kemiskinan berwajah perempuan?”

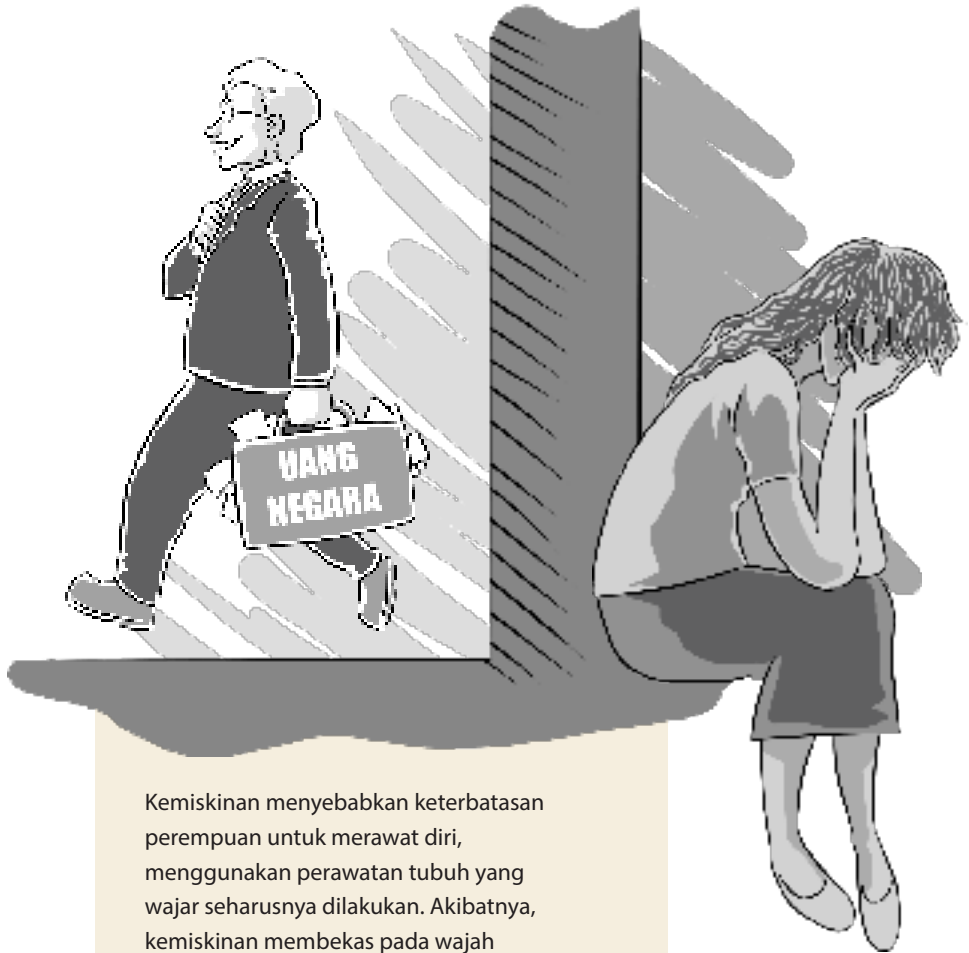
Para ahli pembangunan menganalisis perbandingan data pembangunan yang telah terpisah antara data laki-laki dan perempuan, dengan kesimpulan bahwa kemiskinan lebih berdampak terhadap perempuan. Akhirnya muncul suatu istilah “kemiskinan berwajah perempuan”. Hasil tersebut telah dibukukan dan disosialisasikan sebagai upaya solusi mengatasinya.

Penulis memaknai ungkapan “kemiskinan berwajah perempuan” bahwa kemiskinan sama-sama menimpa laki-laki dan perempuan. Ketika dalam satu keluarga maka dampak kemiskinan dirasakan oleh semua anggota keluarga.

Namun demikian, kemiskinan lebih terlihat membekas atau meninggalkan jejaknya pada perempuan.

Kemiskinan membuat konsumsi pangan yang terbatas, khususnya konsumsi pangan sumber protein yang harganya lebih mahal. Akibatnya, prevalensi anemia pada perempuan semakin tinggi yang menyebabkan mudah lelah, letih, lemah, dan lesu sehingga akan sangat mengganggu kualitas hidup sehari-hari, mengganggu produktivitas perempuan, serta mengganggu dalam proses pengasuhan.

Demikian dengan kekurangan kalsium yang menyebabkan pengambilan kalsium dari tulang semakin meningkat, terutama ketika perempuan hamil dan menyusui, akibatnya perempuan lebih berisiko osteoporosis, kerontokan gigi yaitu lebih cepatnya gigi tanggal di usia yang masih muda.



Kemiskinan menyebabkan keterbatasan perempuan untuk merawat diri, menggunakan perawatan tubuh yang wajar seharusnya dilakukan. Akibatnya, kemiskinan membekas pada wajah perempuan yang cenderung kusam, kering, dan menghitam. Sampai pada titik tertentu, bekas tersebut akan menetap dan mempercepat laju penuaan, dan tidak dapat dipulihkan. Itulah jejak kemiskinan pada perempuan sehingga penulis menyepakati adanya klaim bahwa “kemiskinan berwajah perempuan”.

6. Rumusan Masalah

Nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia adalah bahwa:

Perempuan dan peran mulianya sebagai seorang ibu yaitu orang pertama yang harus mengajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada anak dan keluarga.

Perempuan selalu ditempatkan menjadi pribadi yang mulia dan tanpa cela sehingga saat ia melakukan kesalahan akan dianggap tidak wajar oleh dunia. Media akan melebarkan beritanya hingga ke latar belakang perempuan tersebut, gaya hidup, dan berapa pengeluaran sebulan untuk perawatan kecantikannya.

Respons seperti ini jarang kita dapati jika laki-laki yang melakukan korupsi. Seakan-akan korupsi sudah biasa dan menjadi bisa diterima jika pelakunya adalah laki-laki.

Terdapat pandangan bahwa keterlibatan perempuan dalam lingkaran korupsi disebabkan oleh sikap yang tidak kritis dari perempuan sehingga ikut terjerumus dalam praktik korupsi. Namun tidak tertutup juga kemungkinan perempuan menjadi pelaku sentral dalam tindak korupsi, sedangkan kelompok perempuan yang masuk ke lingkaran kekuasaan sangat rentan untuk ikut terjerumus.



1. Bagaimana mengoptimalkan peran dan kapasitas perempuan sebagai bagian dari masyarakat dalam menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju?
2. Sebagaimana laki-laki, perempuan bisa menjadi pelaku korupsi, menjadi korban korupsi, atau bergerak sebagai aktivis antikorupsi. Namun bagaimana mencegah perempuan agar tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana meningkatkan peran dan partisipasi aktif para perempuan dalam mendukung pemberantasan korupsi, khususnya dalam:
 - a. Implementasi pendidikan antikorupsi yang komprehensif sehingga masyarakat tidak ingin melakukan korupsi;
 - b. Ikut serta meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas para penyelenggara pemerintahan negara;
 - c. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi;
 - d. Keberanian melaporkan tindak pidana korupsi;

7. Tujuan dan Kerangka Isi Buku

Memotivasi para perempuan semakin memahami dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Penulisan buku ini secara umum bertujuan untuk menyediakan materi bacaan sehingga mendorong para perempuan semakin memahami dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Secara khusus penulisan buku ini bertujuan untuk:

1. Menunjukkan masih besarnya tindak pidana korupsi dan tantangan pemberantasannya. Korupsi yang berdampak memiskinkan masyarakat, dan lebih membekas kepada perempuan;
2. Menyediakan bahan dan mengajak perempuan untuk:
 - a. menjadi pribadi berintegritas dengan memenuhi semua tugas perkembangan secara keseluruhan;
 - b. berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga yang dibangunnya menjadi keluarga antikorupsi;
 - c. berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi dengan membangun budaya antikorupsi; serta

3. Menyediakan bahan-bahan alternatif pilihan aksi untuk dipilih atau dijadikan dasar pengembangan aksi pemberantasan korupsi.



Sumber:
Divisualisasikan oleh
penulis

Kerangka tulisan buku ini menggambarkan peran (role) dan pertanggungjawaban peran (role accountability) yang minimal bagi seorang perempuan dalam partisipasi aktifnya dalam pemberantasan korupsi. Andai para perempuan dapat menjalankan peran tersebut maka diharapkan visi dan misi pemberantasan korupsi di Indonesia akan terwujud.

Pentingnya peran perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

8. Manfaat Bagi Pembaca

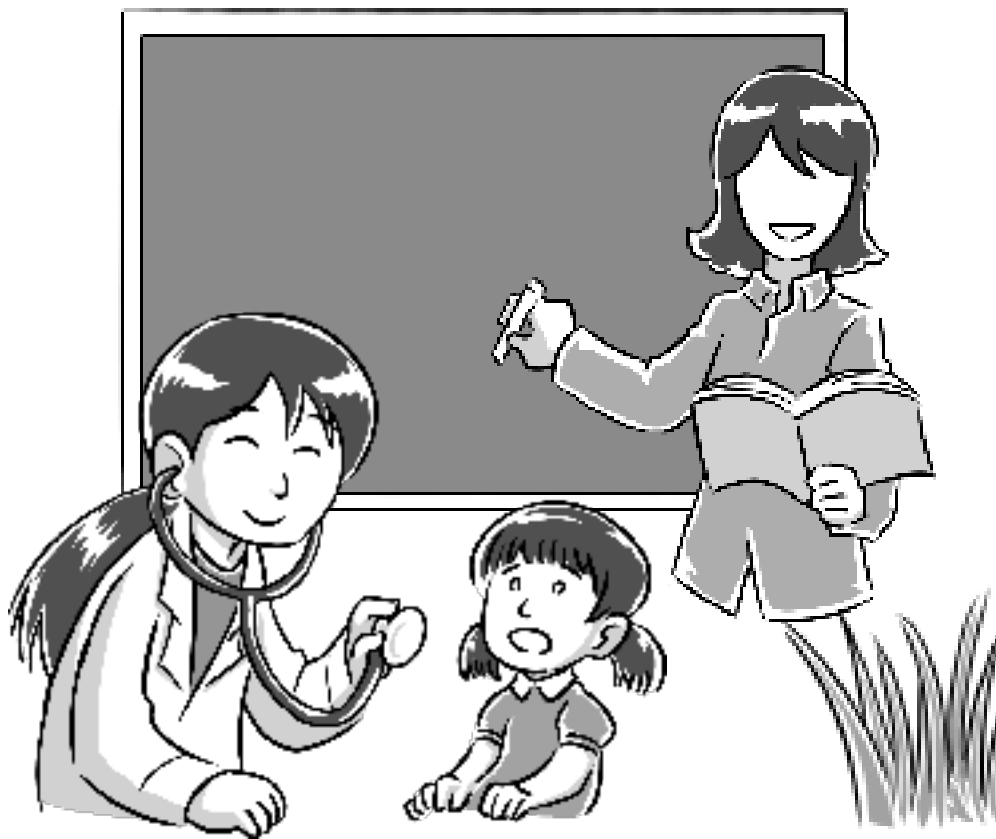
Bagi pembaca yang merasa belum terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi, Anda beruntung karena dengan membaca buku ini, anda akan:

1. Memahami pentingnya peran perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi, dimulai dengan bagaimana meraih pribadi berintegritas, memenuhi beragam peran khususnya sebagai istri dan ibu dalam keluarga untuk membangun keluarga antikorupsi;
2. Memahami pentingnya membentengi lingkungan dengan membangun budaya antikorupsi di lingkungan eksternal keluarga, baik lingkungan terdekat pertetanggaan, komunitas, lingkungan di tempat kerja, dan organisasi atau lembaga masyarakat; serta
3. Termotivasi untuk melakukan beragam aksi dan/atau mengembangkan aktivitas yang sesuai dengan konteks tantangan dan lingkungan di mana pun perempuan berada dengan mengambil dari bahan pilihan aksi yang akan disampaikan di akhir buku.

Bagi pembaca yang selama ini sudah pernah terpapar informasi, termotivasi, bahkan sudah terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi, dengan membaca buku ini maka Anda akan:

1. Melengkapi dan menguatkan alasan-alasan untuk semakin berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi;
2. Memelihara semangat dan motivasi untuk terus konsisten dalam gerakan antikorupsi di semua lingkungan perempuan berada; serta
3. Menguatkan, memperluas langkah, dan semakin kreatif serta inovatif dalam aksi membangun budaya antikorupsi.





BAB 2 MENJADI PEREMPUANMULIA BERINTEGRITAS

Berbicara tentang peran perempuan dalam pemberantasan korupsi dimulai dari pembahasan bagaimana perkembangan seorang perempuan meraih integritas dirinya sepanjang kehidupannya. Integritas merupakan salah satu nilai utama dari perilaku antikorupsi.



Bagian buku ini diberi judul “Menjadi Perempuan Berintegritas” untuk menekankan pada proses dan perjalanan meraih integritas. Proses tersebut dituliskan dalam buku ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu diawali dengan pembahasan eksistensi

diri perempuan, kemudian membincang bagaimana perempuan “Menjadi Aku dan Diriku”, serta berbincang bagaimana perempuan menjadi seorang “Empu” yang terpandang, dihormati, dan mulia.

1. Eksistensi Diri Perempuan

Eksistensi diri perempuan yang paling utama dan paling awal adalah merujuk atas status keberadaan perempuan di muka bumi. Terdapat dua kategori peran, yaitu utama dan turunannya. Kemuliaan perempuan ditunjukkan bagaimana perempuan menjalankan peran utama dan turunannya tersebut. Perempuan, sebagaimana juga laki-laki sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki peran utama sebagai “makhluk” yang memiliki peran atau kewajiban memperhatikan tugas dari Yang Maha Kuasa atas kehadirannya di muka bumi. Manusia sebagai makhluk yang membutuhkan lingkungan sesamanya, tidak mungkin hidup sendirian dalam memenuhi semua kebutuhannya sehingga perempuan memiliki peran kedua yaitu sebagai makhluk sosial dan memiliki kewajiban menjaga hubungan baik dan menjadi bagian dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya manusia merupakan bagian dari alam dan membutuhkan alam untuk menopang kehidupannya sehingga perempuan memiliki peran ketiga sebagai bagian dari alam yang memiliki kewajiban menjaga alam berkualitas dan berkelanjutan.

-
1. Melaksanakan tugas sebagai Makhluk dan menjaga hubungan dengan Sang Pencipta,
 2. Sebagai makhluk sosial menjaga hubungan dengan manusia lainnya, serta
 3. Sebagai bagian dari ekosistem alam, bertugas menjaga hubungan dengan alam.
-



2. Ragam Peran Perempuan

Perempuan memiliki beragam peran yang diharapkan bahkan dituntut oleh lingkungannya untuk dipertanggungjawabkan sepanjang kehidupannya. Pertanggungjawaban peran perempuan diimplementasikan melalui beragam tugas sesuai konteks dan hubungannya.

Jika lengkap, perempuan memiliki 8 peran dalam kehidupannya, dan dituntut diimplementasikan dalam beragam tugas. Beberapa peran sering kali overlapping dan dilakukan secara bersamaan atau disebut multiperan (multiroles) dan dilaksanakan dalam satu satuan waktu yang sama atau dikenal multitugas (multitasks)³.

Salah satu contoh dari multiperan dan multitugas yang sehari-hari dihadapi perempuan adalah dalam mengatur keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan keluarga maka perempuan baik sebagai diri sendiri (dengan kebutuhan yang spesifik sesuai usia dan kondisi kesehatan) akan sekaligus berinteraksi dengan peran sebagai istri (mempertimbangkan kebutuhan spesifik suami), berinteraksi dengan peran sebagai ibu (untuk mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan anak-anak), demikian halnya berinteraksi dengan peran sebagai anak (yang mempertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan mertuanya). Bahkan juga akan berinteraksi dengan peran sebagai teman dalam peer group-nya, juga peran sebagai anggota komunitas.

Partisipasi aktif perempuan dalam pemberantasan korupsi dilakukan menyatu dalam ragam peran dan tugas perempuan.

³ Sunarti E. 2021. Dari yang Terserak, Titian Perjalanan Memahami Ketahanan Keluarga. Bogor: IPB Press

1. Sebagai diri sendiri

Perempuan memiliki tugas untuk tumbuh dan berkembang mencapai kematangan menurut usianya. Perempuan berkembang menjadi pribadi yang berakhlak, berkarakter, beradab, berintegritas, mencegah diri dari perbuatan korupsi, bahkan turut mengambil bagian dalam pemberantasan korupsi.

2. Sebagai anak & bagian dari keluarga asalnya

Menjadi anak yang berbakti dan saudara yang perhatian serta penyayang. Seorang perempuan akan membantu menjaga keluarga dari perilaku korupsi sebagai tindakan amoral dengan mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai antikorupsi di keluarga asalnya, kepada ayah ibu dan saudara-saudaranya, serta seluruh kerabat dalam keluarga besar ayah ibunya.

3. Sebagai istri

Perempuan sebagai istri, berbakti pada suami dan bersama-sama mengambil keputusan terbaik bagi masa depan anak-anak dan keluarga, termasuk keputusan pola hidup non-materialistik serta tidak konsumtif yang dapat menjadi salah satu penyebab perilaku korupsi. Istri mendukung, menguatkan, mendorong suami untuk berperilaku jujur, khususnya dalam perolehan harta yang halal untuk menafkahi keluarga. Perempuan mengembangkan sikap kesyukuran dan kecukupan, serta gaya hidup sesuai dengan kemampuan.

4. Sebagai ibu

Perempuan sebagai ibu, memiliki tugas mengasuh dan mendidik anak, mengajarkan keterampilan hidup, akhlak, adab, serta karakter baik kepada anak-anaknya. Perempuan sebagai ibu,

pendidik pertama dan utama bagi anak, pembentuk karakter antikorupsi anak. Ujung tombak yang menentukan karakter dan kekuatan generasi penerus bangsa.

Secara sosiologis yang ditunjukkan dalam banyak penelitian, perempuan sebagai ibu memiliki peran yang dominan dalam keluarga. Ibu memegang peranan penting dalam pembentukan nilai dan pengembangan karakter anak.

Perempuan sebagai ibu merupakan tugas yang sangat mulia. Ibu memiliki peran besar dalam memelihara, membangun, membentengi peradaban. Hal tersebut tercermin dalam nilai “surga berada di telapak kaki Ibu” yang dianut masyarakat Indonesia. Kemuliaan perempuan membuat ucapan dan nasihatnya memiliki kekuatan untuk mengubah

dan membuat perubahan, termasuk dalam hal antikorupsi.

5. Sebagai anggota peer group

Perempuan di lingkungan peer group-nya berperan sebagai teman atau sahabat yang menyenangkan, tempat berdiskusi baik masalah pekerjaan maupun rumah tangga dan pengasuhan, tempat brainstorming ide maupun melepas penat. Perempuan memiliki peluang yang besar untuk merealisasikan nilai-nilai antikorupsi.

6. Sebagai sejawat di lingkungan kerja

Perempuan sebagai tenaga kerja yang produktif, bekerja efektif dan efisien, mendapat pengakuan, dan penghargaan di lingkungan pekerjaannya. Perempuan memiliki kesempatan besar untuk mengedukasi, khususnya penghayatan nilai dan perilaku antikorupsi di lingkungan pekerjaannya.

7. Sebagai bagian dari masyarakat

Perempuan bertempat tinggal di suatu wilayah dengan menjadi bagian dari lingkungan pertetangga dan masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai makhluk sosial, perempuan akan melakukan komunikasi, interaksi bahkan transaksi secara aktif di lingkungannya. Hal tersebut merupakan sarana yang baik untuk mengedukasi nilai-nilai antikorupsi.

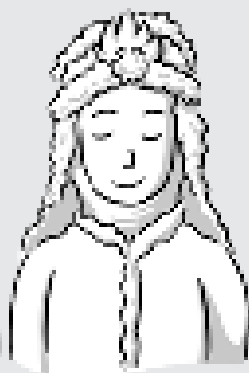
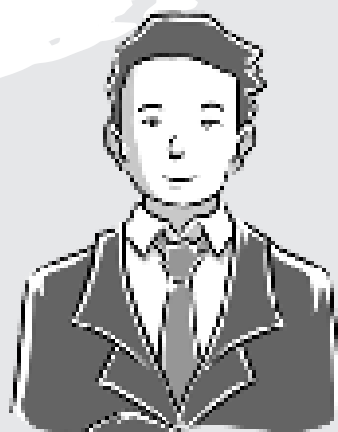
8. Sebagai warga negara

Perempuan bertugas sebagai warga negara yang baik, taat aturan hukum, dan norma sosial. Perempuan pun dianggap sebagai akar kejayaan negara. Sebagaimana Presiden Soekarno pernah menyatakan “Kalau perempuan itu baik, maka jayalah negara. Tetapi kalau perempuan itu buruk, maka runtuhlah negara.”

**Pertanggung-
jawaban peran
perempuan dalam
gerakan
antikorupsi.**

Multiperan dan multitugas perempuan memungkinkan di dalamnya terdapat tuntutan perempuan untuk berperan dalam pemberantasan korupsi, edukasi dan aksi antikorupsi. Multiperan perempuan hendaknya menyadarkan bahwa banyak perempuan sejatinya tidak hanya membangun atau meningkatkan kualitas diri dan keluarganya semata, tetapi juga membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pencapaian tujuan kemerdekaan untuk kemakmuran bangsa, membutuhkan prasyarat yaitu tanpa korupsi.





PAJAK



3. Menjadi Aku dan Diriku

Perempuan berproses menjadi “Aku dan Diriku” sejak awal 100 hari pertama kehidupan dan berlangsung terus setiap saat, tak mengenal waktu dan tempat. Siklus kehidupan yang dikelompokkan secara sederhana sejak janin, bayi, anak, remaja, dewasa awal, dewasa menengah, dewasa akhir, lanjut usia, hingga tua.

Setiap perempuan, sebagaimana pula setiap manusia, pada dasarnya adalah unik, berbeda satu dengan yang lainnya, tidak ada yang sama. Pengetahuan dan pemahaman ini hendaknya mewarnai proses perempuan dalam menjalani kehidupan dan dalam proses menjadi “Aku dan Diriku”. Perempuan mengoptimalkan potensi dan kapasitasnya agar dapat memenuhi tugas kehidupan yang diembannya.

Perempuan (sebagaimana juga laki-laki) memiliki tiga tugas sepanjang kehidupannya, yaitu tugas dasar (basic tasks), tugas perkembangan (developmental tasks), dan tugas krisis (crisis tasks).

1. Tugas dasar berupa pemenuhan kebutuhan dasar penopang kehidupan seperti kebutuhan mengonsumsi makanan bergizi agar tumbuh dan hidup secara sehat, berpakaian yang layak, memiliki tempat berteduh yang layak dan berkualitas, mendapatkan pendidikan, serta hidup yang sehat.
2. Tugas perkembangan terkait proses untuk berperan dan berfungsi menjadi “seseorang” yang diharapkan memiliki kematangan sesuai usianya dan berlaku di mana pun berada.

3. Tugas krisis terkait proses berinvestasi mempersiapkan diri agar mampu mencegah kerentanan sebelum terjadi dan/atau mencegah hal tersebut menjadi krisis. Di mana krisis adalah situasi yang tidak dikehendaki terjadi oleh siapa pun.

Untuk memahami kondisi dan cara berpikir seorang perempuan, perlu dipahami juga proses perkembangan yang dilaluinya, yaitu meliputi perkembangan kognitif, emosi, psikososial-kepribadian, dan moral-spiritual. Pada bagian ini, proses perkembangan tersebut akan dibahas satu per satu.

Setiap perempuan, sebagaimana pula setiap manusia, pada dasarnya adalah unik, berbeda satu dengan yang lainnya, tidak ada yang sama.

Moral seseorang dibentuk oleh lingkungannya, khususnya lingkungan terdekatnya yaitu keluarga dan sebaliknya moral seseorang pun akan membentuk lingkungannya.

4. Perkembangan Moral

Menjadi seseorang yang berkarakter, berakhlak, beradab menjadi tugas perkembangan seorang perempuan sepanjang kehidupannya. Perkembangan tersebut membawa seorang perempuan dapat mengetahui, memahami, dan membedakan perilaku apakah:

- benar atau salah
- baik atau buruk
- etis atau tidak etis
- pantas atau tidak pantas
- boleh atau tidak boleh

Secara umum, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Moral seseorang akan sangat menentukan perilaku dan sifat individu tersebut. Moral seseorang dibentuk oleh lingkungannya, khususnya lingkungan terdekatnya yaitu keluarga dan sebaliknya moral seseorang pun akan membentuk lingkungannya. Perkembangan moral seseorang didasarkan terutama oleh penalaran moral yang berlangsung secara bertahap sepanjang perjalanan hidup seseorang.

Kohlberg's Levels of Moral Development

Level	Stage	Characteristics of Stage/Level
Preconventional	Stage 1	punishment-obedience orientation
	Stage 2	instrumental relativist orientation
Conventional	Stage 3	interpersonal concordance orientation
	Stage 4	authority and social-order maintaining orientation
Postconventional, Autonomous or Principled	Stage 5	social-contract legalistic orientation
	Stage 6	universal ethical principle orientation

Sumber:
Kohlberg (1963, 1981)

Kohlberg⁴ membagi perkembangan moral menjadi tiga tingkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional. Namun, sebelum masuk ke tingkat prakonvensional, ada tahapan yang disebut dengan tingkatan nol. Tahap ini terjadi pada bayi usia 0 hingga 18 atau 24 bulan. Pada tahap ini, anak menganggap baik apa yang sesuai dengan permintaan dan keinginannya.

⁴ Kohlberg L. 1981. The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice. 1st Edition. New York City: Harper & Row.

1 Prakonvensional

Tingkat prakonvensional terjadi pada usia sekitar 2–10 tahun. Pada tingkat ini, terdapat dua tahapan yaitu tahap orientasi kepatuhan dan hukuman (punishment-obedience orientation) serta tahap orientasi kepentingan pribadi (instrumental relativist orientation).

- a. Di tahap orientasi kepatuhan dan hukuman, acuan moral dipelajari berdasarkan respons lingkungan, khususnya lingkungan terdekatnya. Anak belajar tentang baik dan buruk melalui hadiah dan hukuman. Pada tahap ini, anak mematuhi peraturan semata-mata untuk mendapatkan pujian/apresiasi atau menghindari hukuman/respons yang tidak menyenangkan.
- b. Pada tahap kedua, yaitu orientasi kepentingan pribadi, anak mulai memiliki kehendak. Tindakan anak semata-mata didasari keinginan dan kepuasan pribadinya, belum mampu mempertimbangkan keadilan bagi orang lain.

2 Konvensional

Tingkat konvensional terjadi pada umur 8 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mencari persetujuan dari orang-orang di sekitar mereka. Anak mulai patuh dan secara aktif mendukung standar yang berlaku di masyarakat. Tingkat ini terdiri atas tahap ketiga yaitu konformitas dan keserasian (interpersonal concordance orientation), dan tahap keempat yaitu mentalitas otoritas dan aturan (authority and social-order maintaining orientation).

- a. Di tahap ketiga, anak mencari persetujuan dari orang lain untuk memutuskan suatu tindakan. Oleh karena itu, nilai dan aturan yang tegas dan konsisten dari keluarga sangat penting pada tahap ini sehingga anak bisa membedakan perbuatan baik dan buruk.
- b. Di tahap keempat, mulai tumbuh dalam diri anak kesadaran akan kewajiban. Anak mulai tertarik pada otoritas dan mempertahankan keteraturan sosial. Walaupun begitu, belum muncul rasa tanggung jawab secara penuh pada anak. Contohnya, apabila orang tua mengajarkan untuk mengantri, anak akan protes saat melihat orang yang tidak mengantri.

Pascakonvensional

Tingkat Pascakonvensional terjadi setelah usia 11 tahun, ketika moralitas berkembang menjadi pendirian pribadi. Pada masa ini, baik dan buruk sudah dipertimbangkan secara personal melalui nurani yang tercerahkan (enlightened conscience). Tahap ini terdiri atas tahap 5 dan 6.

- a. Pada tahap 5, orientasi hukum dan legalitas (social-contract legalistic orientation), terjadi pengakuan terhadap aturan atau hukum umum, tetapi sudah mulai disisipkan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan nilai moral pribadi.
- b. Pada tahap 6, prinsip etika universal (universal ethical principle orientation), adalah tahap tertinggi, di mana perilaku didasari oleh pertimbangan nurani berdasarkan standar nilai yang telah tertanam dalam diri. Pada tahap ini, manusia bertindak bukan karena rasa takut, aturan hukum, atau mencari persetujuan, tetapi menurut kata hati nurani yang dipikir benar.

Proses perkembangan moral pada individu perempuan (sebagaimana juga pada laki-laki) sejatinya membawa kepada sikap dan perilaku antikorupsi.

5. Perkembangan Kognitif

Perempuan yang perkembangan mental kognitifnya baik, akan membawanya kepada kemampuan untuk menghitung dan memprediksi risiko sehingga mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya serta orang-orang terdekat yang disayanginya dan/atau yang menjadi perhatian dan tanggung jawabnya.

Perempuan yang cerdas akan mengetahui risiko dari perilaku korupsi, akan mengetahui kerugian akibat dari perilaku korupsi.

Perempuan yang cerdas atau yang perkembangan kognitifnya baik, bukan hanya akan menghitung kerugian secara material (jika tertangkap melakukan korupsi) namun juga kerugian non-material, seperti biaya tak ternilai akibat malu, harga diri jatuh, nama diri sendiri, dan keluarga rusak. Selain itu, perhitungan kerugian secara spiritual dan religius, yaitu mendapat dosa.

Mengacu teori Piaget⁵, perkembangan kognitif setiap individu sepanjang tahap hidupnya terjadi atas empat tahap, yaitu:

1 Tahap perkembangan sensorimotor (usia sampai 2 tahun)

2 Tahap pra-operasional (usia 2–7 tahun)

3 Tahap operasional (usia 7–11 tahun)

4 Tahap operasional formal (usia 11–16 tahun dan seterusnya)

Edukasi yang dimulai dengan sosialisasi sampai internalisasi nilai-nilai, seperti nilai antikorupsi yang dilakukan baik oleh perempuan maupun kepada perempuan, hendaknya memperhatikan metode dan teknik yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya.

⁵ Piaget J. 1932. *The Language and Thought of The Child*. London: Routledge.

Perkembangan kognitif terakhir berlangsung dalam waktu yang sangat panjang yaitu sejak usia 11 tahun sampai dewasa.

Tahap perkembangan kognitif pertama yaitu tahap sensorimotor berlangsung sampai umur 2 tahun, di mana seorang bayi bersifat egosentris yang melihat dunia dari pengalaman gerakan dan sensorinya semata. Tahap sensorimotor ini dibagi lagi dalam 6 subtahap dengan masa subtahap perkembangan berlangsung dalam waktu yang pendek. Tahap kedua, yaitu perkembangan pra-operasional pada umur 2–7 tahun meliputi dua sub-perkembangan yaitu kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek di sekitarnya (2–4 tahun) dan dengan berpikir yang masih berpusat kepada dirinya (egosentris) (4–7 tahun). Tahap selanjutnya seorang individu pada usia 7–11 tahun diharapkan memiliki perkembangan kognitif berupa mampu berpikir logis. Pada tahap ini, seorang individu sudah berkurang egosentrismenya, dan mengembangkan perhatian terhadap di sekelilingnya, walau masih belum mampu berpikir abstrak. Perkembangan kognitif terakhir berlangsung dalam waktu yang sangat panjang yaitu sejak usia 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini seseorang mampu berpikir abstrak, membedakan secara detail, menghubungkan, menganalisis sebab-akibat dan memprediksi.

6. Perkembangan Psikososial

Perkembangan psikososial atau kepribadian mendapat perhatian penting karena dipandang lebih kompleks dibandingkan perkembangan lainnya. Sangat beragam dan bervariasi faktor penentu berdampak terhadap pembentukan kepribadian sehingga menyebabkan tidak mudahnya mendeteksi kepribadian seseorang. Namun demikian, ditemukan pola secara umum perkembangan psikososial-kepribadian seseorang, salah satunya adalah yang ditemukan oleh Eric Ericson⁶.

Perkembangan psikososial-kepribadian Erik Erikson menjadi tepat berkaitan dengan bagaimana proses perkembangan perempuan "Menjadi Aku dan Diriku"

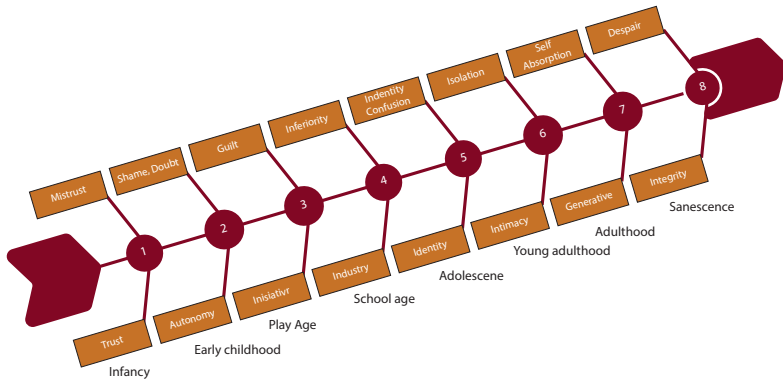
untuk menjadi bagian dalam gerakan antikorupsi. Perkembangan ini menjadikan dan menempatkan "integritas" sebagai tahap akhir perkembangan psikososial.

Penulis memaknai hal tersebut bahwa proses menjadi seorang perempuan berintegritas berlangsung sejak awal dan seluruh proses perkembangannya ditanamkan dalam upaya meraih "integritas" sebagai tahap akhir perkembangan. Hal ini berarti bahwa kebutuhan penghayatan nilai integritas sebagai salah satu nilai antikorupsi, hendaknya terus dilakukan tanpa dibatasi usia dan tahap perkembangan.

Menurut Erik Erikson, perkembangan psikososial atau kepribadian seseorang terbagi menjadi 8 tahap sesuai tahap perkembangan umum, yaitu periode bayi, kanak-kanak awal, usia bermain, usia sekolah, masa remaja, dewasa awal, dewasa, dan masa tua.

⁶ Erikson E. 1993. *Childhood and Society*. 2nd Edition. New York: WW Norton & Company.

Ericson's Stage of Psychosocial Development



Tahap Perkembangan Sosial & Kepribadian

Infancy (0–2 thn)	→	Trust vs Mistrust
Early childhood (2–4 thn)	→	Autonomy vs Shame, Doubt
Preschool age (4–7 thn)	→	Initiative vs Guilt
School age (7–12 thn)	→	Industry vs Inferiority
Adolescence (12–20 thn)	→	Identity vs Identity Confusion
Young adulthood (20–40 thn)	→	Intimacy vs Isolation
Adulthood (40–65 thn)	→	Generativity vs Stagnation
Senescence (+65 thn)	→	Ego Integrity vs Despair

Sumber:

Sunarti E. 2020.

Saya Keluarga Anti Korupsi (SKAK)

Proses membangun integritas sebagai nilai antikorupsi melewati jalan panjang tak berkesudahan, hendaknya dilakukan terus-menerus sejak dini dengan membangun “trust” hingga akhir masa usia.

**1. Trust vs Mistrust
(Percaya vs Tidak Percaya)**

Perkembangan ini terjadi pada bayi sampai usia 2 tahun, kelekatan yang terbangun dengan orang terdekatnya (diharapkan ibu dan/atau ayah) akan membentuk kelekatan yang aman (secure attachment) sehingga bayi membentuk kepribadian “trust” yaitu percaya bahkan lingkungannya aman, dunia ini indah atau sebaliknya, membangun “mistrust”.

**2. Autonomy vs Shame & Doubt
(Otonomi vs Malu & Ragu)**

Pada periode ini (usia 2–4 tahun), seorang individu melanjutkan perkembangan kepribadian memperoleh otonomi atau sebaliknya perasaan ragu dan malu. Ketika bayi mengembangkan “trust” maka akan berpeluang besar memperoleh “autonomy”.

**3. Initiative vs Guilt
(Inisiatif vs Rasa Bersalah)**

Pada masa ini (usia 4–7 tahun), seorang individu mengembangkan kepribadian yang positif (inisiatif) atau sebaliknya (merasa bersalah). Kegagalan dan ketidakpuasan dapat membawa kepada rasa bersalah.

4. Industry vs Inferiority

Tahap perkembangan ini berlangsung pada usia sekolah (7–12 tahun) sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya. Pada masa ini seorang individu memiliki keingintahuan yang besar dan aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Proses pembelajaran yang berhasil akan membawa pada perkembangan yang positif, sebaliknya kegagalan akan membawa pada rasa rendah diri.

5. Identity vs Identity Confusion

Di periode ini (usia remaja 12–20 tahun), seorang individu beraktivitas di lingkungan yang semakin luas. Pada tahap ini seseorang membangun identitas diri yang jelas dan positif atau kebalikannya mengalami keraguan identitas diri. Perkembangan positif membawa seorang individu akan memiliki kesetiaan dan keteguhan yang baik perihal pandangan ideologi, visi masa depan, dan prinsip hidup. Periode ini sangat penting karena di waktu inilah seseorang mencapai tingkat identitas ego dirinya, yaitu mengetahui siapa dirinya dan bagaimana ia terjun ke tengah masyarakat.

6. Intimacy vs Isolation

Tahap perkembangan ini terjadi pada masa dewasa awal (20–40 tahun). Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, di periode ini lingkungan relasi seorang individu mengerucut. Pada masa ini, individu semakin selektif. Pada tahap ini, timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu.

7. Quality Over Quantity

Pada periode ini, seseorang ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindari sikap menyendiri. Perkembangan ini dapat dilihat dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain guna memperlihatkan dan mencapai kedekatan dengan orang lain. Namun, peristiwa ini akan memiliki pengaruh yang berbeda apabila seseorang dalam tahap ini tidak mempunyai kemampuan untuk menjalin relasi dengan orang lain secara baik sehingga akan tumbuh sifat merasa terisolasi (menutup diri).

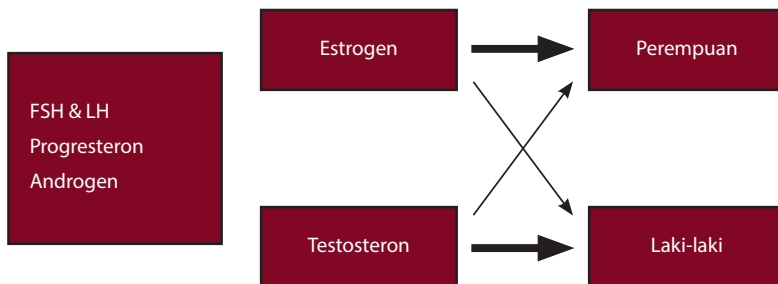
8. Generativity vs Stagnation

Tahap perkembangan ini terjadi pada masa dewasa (40–65 tahun). Pada tahap ini individu yang mengalami perkembangan positif, akan sampai mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Hal sebaliknya dialami oleh individu yang mengalami stagnasi.

9. Integrity vs Despair

Hasil akhir perkembangan psikososial-kepribadian terjadi pada usia lanjut (>65 tahun), apakah seorang individu mampu meraih integritas diri atau sebaliknya memperoleh keputusan atas kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap perjalanan hidupnya selama ini.

Perbedaan kromosom dan hormonal laki-laki dan perempuan



Sumber:

Sunarti E. 2020. Harmonisasi Femininitas dan Maskulinitas Bagi Keberfungsian Keluarga.

7. Menjadikan Seorang “Empu”

Harapan bahkan tuntutan kepada perempuan agar berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi serta mengedukasi dan membangun nilai serta budaya antikorupsi yang sewajarnya dan seharusnya. Namun demikian, perlu dipilih ruang dan mekanisme yang sesuai dengan potensi serta keunggulan yang dimiliki perempuan. Hal itu membawa kepada penggalan sifat pembawaan unik perempuan.

Secara etimologis (asal-usul kata), perempuan menunjukkan akar kata “empu” yaitu panggilan kepada seseorang yang memiliki posisi strategis, dihormati, dihargai, dan dimuliakan. Dengan demikian, menjadi perempuan dapat dimaknai sebagai proses menjadikan seorang memenuhi syarat menjadi “empu” tersebut.

Secara genetis, perempuan diwakili oleh dua kromosom X, sedangkan laki-laki memiliki dua kromosom X dan Y. Dengan kromosom yang berbeda dari laki-laki, perempuan memiliki sistem hormonal reproduksi yang berbeda pula dengan laki-laki. Hal ini mengakibatkan sistem hormonal feminin yang jauh lebih dominan dari sistem hormon maskulin. Proporsi hormonal reproduksi perempuan, membuat perempuan memiliki kualitas feminin yang lebih dominan dari kualitas maskulin. Hal sebaliknya terjadi pada laki-laki.

Kualitas feminin dan maskulin

Kualitas & Identitas Feminin	Kualitas & Identitas Maskulin
Kelembutan	Keperkasaan
Kehangatan	Kekuatan
Kehalusan	Kekuasaan
Kedekatan	Ketegasan
Keramahan	Kedisiplinan
Kesabaran	Ketegaran
Mengasihi	Kemandirian
Menyayangi	Kompetensi
Merawat	Dominasi
Peduli	
	
Pasrah, berserah diri, dekat, kasih, dan pemelihara	Aktif, progresif, berkuasa, independen, jauh, dan dominan
Maskulin (+/-) Feminin (+/-)	

Sumber:
Sunarti E. 2020. Harmonisasi Femininitas dan Maskulinitas Bagi Keberfungsian Keluarga.

Bagi perempuan dalam mengemban berbagai peran dan berbagai tugas.

Salah satu peran dan tugas penting yaitu aktif dalam pemberantasan korupsi.

Ringkasan dari berbagai hasil penelitian dan kajian mengenai sifat, identitas, serta kualitas feminin pada perempuan, penulis menyoroti dua kelompok identitas dan kualitas tersebut patut dioptimalkan peran aktifnya dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Dua kelompok identitas tersebut meliputi:

1. Dominansi kualitas feminin sehingga memiliki sifat perhatian, kepekaan, kepedulian, kelembutan, kesabaran, dan kebaikan.
2. Sistem otak perempuan menunjukkan bahwa perempuan mampu memikirkan banyak hal dalam satu waktu, mampu menangkap lebih banyak rangsangan perkembangan dan informasi yang diterima melalui mata, lebih ekspresif dalam berkomunikasi, serta lebih akomodatif untuk melakukan multitasking.

Keunggulan sifat dan kualitas perempuan merupakan desain yang sempurna dari Yang Maha Pencipta sehingga menjadi modal dan aset yang berharga bagi perempuan dalam mengemban berbagai peran dan berbagai tugas. Salah satu peran dan tugas penting yaitu aktif dalam pemberantasan korupsi.



BAB 3

PERAN PEREMPUAN WUJUDKAN KELUARGA ANTI KORUPSI

Bab ketiga ini menguraikan peran kedua dari seorang perempuan dalam pemberantasan korupsi, yaitu bagaimana perempuan mewujudkan keluarga antikorupsi. Implementasi peran tersebut paling tidak meliputi tiga hal, yaitu diawali



oleh kesiapan pernikahan perempuan atau kesiapan untuk berkomitmen membentuk keluarga dan menjalankan perannya sebagai istri serta ibu. Hal kedua adalah penghayatan nilai antikorupsi yang dilakukan perempuan sebagai istri dan ibu.

Ketiga adalah kerangka kerja perempuan dalam membangun budaya antikorupsi di keluarga, salah satu komponen di dalamnya meliputi keterampilan hidup yang perlu dimiliki perempuan untuk mewujudkan keluarga antikorupsi.

Berkeluarga adalah ibadah terlama, di mana pernikahan sebagai pintu gerbangnya, dan kesiapan menikah atau kesiapan berkeluarga sebagai bekalnya.

1. Kesiapan Perempuan Berkeluarga

Harapan kepada perempuan untuk berperan dalam gerakan antikorupsi di keluarga berkaitan dengan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Keberhasilan peran tersebut berkaitan dengan kesiapan perempuan berkeluarga. Kesiapan berkeluarga merupakan hal penting dimiliki oleh setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang ingin dan/atau akan menikah serta membangun keluarga. Istilah kesiapan berkeluarga lebih tepat dibandingkan dengan kesiapan pernikahan karena memiliki makna, lingkup, dan konsekuensi yang lebih luas. Keluarga sebagai sistem sosial terkecil, terbangun dengan adanya peristiwa menikah, di mana kehidupan pernikahan mewarnai sepanjang kehidupan keluarga⁷.

Menikah merupakan proses awal dalam membangun keluarga menjadi satu titik momen penting dari perjalanan panjang membangun keluarga.

Kesiapan berkeluarga menentukan ketahanan pada seluruh tahap perkembangan keluarga. Kesiapan berkeluarga merupakan output dari tugas perkembangan seorang individu dan ditunjukkan oleh derajat kematangan perkembangan individu tersebut.

⁷ Sunarti E. 2021. Inventori Pengukuran Keluarga. Bogor: IPB Press.



Gambar 1
Kesiapan perempuan
membangun keluarga
antikorupsi

Oleh karena itu, kesiapan berkeluarga ditandai oleh kematangan dari lingkup atau komponen perkembangannya, seperti kematangan mental-intelektual, kematangan sosial, kematangan emosi, kematangan moral-spiritual, kematangan biologis, dan keterampilan hidup berkeluarga. Kematangan biologis ditunjukkan secara khusus, yaitu dengan kesiapan seorang individu untuk menjalani fungsi reproduksi yang berjalan seiring usia, di antaranya ketika seseorang telah memasuki usia perkembangan dewasa awal.



Adakah kaitan antara kesiapan perempuan untuk berkeluarga dengan kapasitas perempuan membangun keluarga antikorupsi?

Meningkatnya harapan kepada perempuan, khususnya di lingkungan keluarga untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi maka muncul pertanyaan, adakah kaitan antara kesiapan perempuan untuk berkeluarga dengan kapasitas perempuan membangun keluarga antikorupsi? Jawaban terkait hubungan singkat antara kesiapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kematangan Mental Intelektual	Kematangan individu ini membawa kepada kemampuan perempuan untuk berpikir rasional memperhitungkan secara komprehensif kerugian yang dapat dihitung maupun yang tidak mudah dihitung secara kuantitatif dan menyadari perilaku korupsi akan membawa kerugian bagi keluarga.
Kematangan Sosial	Kematangan individu ini membawa kesadaran perempuan sebagai makhluk sosial, membangun hubungan sosial, dan peduli dengan lingkungan sosial. Kematangan sosial seseorang membuatnya mengembangkan empati dan tidak ingin mengganggu atau mengambil hak orang lain.
Kematangan Emosi	Selain memahami ragam dan faktor emosi diri kematangan emosi juga ditunjukkan dengan kemampuan mengelola dengan baik ragam emosi tersebut, memahami emosi orang lain, dan mengelolanya secara tepat. Kematangan emosi perempuan membawa kepada sikap empati, simpati, peduli, ingin berbagai kepada sesama yang membutuhkan bantuan.
Kematangan Moral-Spiritual	Kematangan ini membawa kepada perempuan untuk menggunakan nilai dan aturan agama serta norma dan moral dalam setiap aksi dan beragam keputusan yang diambil. Landasan spiritual dan moral ini akan berkaitan dengan penghayatan nilai antikorupsi dalam keluarga.
Keterampilan Hidup Keluarga	Keterampilan perempuan dalam mengelola sumber daya, baik materi, waktu, tenaga, pikiran, keuangan agar memenuhi seluruh peran sebagai istri dan ibu akan terkait dengan keberhasilan perempuan menghayati nilai antikorupsi di keluarga.

“

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

”

2. Internalisasi Nilai Antikorupsi di Keluarga

Internalisasi bermakna pelembagaan dan dalam proses internalisasi terdapat proses habituasi atau pembiasaan sehingga hal yang diinternalisasikan akan terlihat menjadi kebiasaan pada akhirnya. Internalisasi nilai-nilai ibarat mengukir di atas batu, membutuhkan usaha dan waktu yang memadai, agar ukirannya membekas dan tidak akan hilang begitu saja terhapus angin atau terbawa air hujan. Hal ini termasuk dengan internalisasi nilai karakter, seperti nilai antikorupsi.

Internalisasi merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan meliputi tiga jenis, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Sementara pendidikan dalam keluarga, terdapat internalisasi dan sering kali dikategorikan sebagai sebagai pendidikan informal. Suatu pendidikan yang memiliki tujuan dan hasil yang diharapkan, sering kali tidak disertai instrumen-instrumen tertulis sebagaimana dilakukan dalam pendidikan formal dan non formal.

Pendidikan dalam keluarga sebagai pendidikan informal juga mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan yang tertulis dalam sistem pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan formal, non formal, dan informal.

Pendidikan antikorupsi dalam keluarga sebagai pendidikan informal, sangat erat kaitannya dengan nilai agama dan nilai moral yang dianut serta diimplementasikan sehari-hari dalam perilaku keluarga. Agama dan moral menjadi landasan serta faktor keberhasilan pendidikan antikorupsi dalam keluarga.

Pendidikan antikorupsi dalam keluarga merupakan bagian dari salah satu strategi pemberantasan korupsi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga strategi pemberantasan korupsi menurut KPK, yaitu:

1

Pendidikan

Target dari strategi ini adalah menghasilkan sikap “tidak mau korupsi”.

2

Pencegahan

Target atau output dari strategi ini adalah perbaikan sistem sehingga tidak ada kesempatan untuk korupsi.

3

Penindakan

Target atau output dari strategi ini adalah membuat efek jera sehingga setiap orang menjadi takut untuk korupsi.

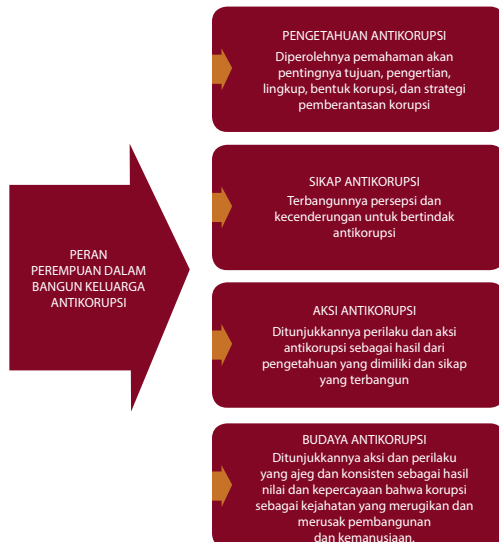
3. Tingkatan *Output* Internalisasi Nilai Antikorupsi

Dari tiga strategi pemberantasan korupsi tersebut maka perempuan lebih menjalankan strategi pertama yaitu pendidikan antikorupsi di keluarga. Tujuan dari strategi tersebut agar seluruh keluarga inti (suami, anak, dan termasuk diri sendiri) dan seluruh keluarga besar (keluarga diri sendiri dan suami) paham mengenai pengertian dan lingkup korupsi, semua bentuk korupsi,

membangun nilai bahwa korupsi adalah kejahatan, dan akhirnya tidak mau melakukan korupsi, bahkan bersedia untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Internalisasi merupakan proses berkelanjutan hingga tujuan pendidikan tercapai. Mengacu pada teori proses pembentukan perilaku dan teori Thomas Lickona mengenai proses pembentukan karakter cinta kebaikan maka penulis memvisualisasikan peran perempuan dalam membangun keluarga antikorupsi dapat digambarkan pada Gambar 2.

Gambar 2
Visualisasi komponen dan indikator hasil peran perempuan dalam pendidikan keluarga antikorupsi



Berikut serangkaian tingkatan hasil pendidikan antikorupsi, khususnya internalisasi nilai antikorupsi dalam keluarga yang dilakukan secara konsisten dan persisten oleh perempuan, khususnya berperan sebagai istri dan ibu dalam keluarga.

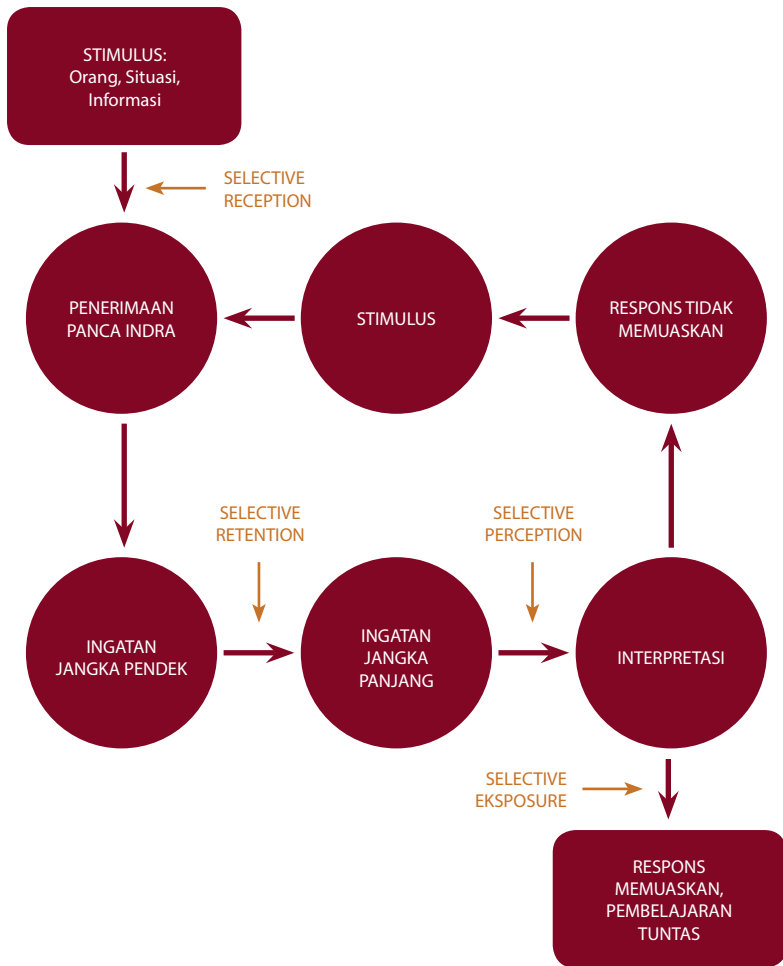
- ✓ Diperolehnya pemahaman pentingnya tujuan, pengertian, lingkup, bentuk korupsi, dan strategi pemberantasan korupsi.
- ✓ Terbangunnya sikap dan persepsi antikorupsi serta kecenderungan untuk bertindak atau melakukan aksi antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari di keluarga.
- ✓ Ditunjukkannya perilaku dan aksi antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari keluarga, seperti dalam pengelolaan sumber daya keluarga, pengambilan keputusan, gaya hidup, dan pola konsumsi. Sebagai hasil dari pengetahuan yang dimiliki dan sikap yang terbangun.
- ✓ Terbentuknya budaya antikorupsi dalam keluarga yang ditunjukkan oleh aksi dan perilaku yang ajeg dan konsisten sebagai hasil nilai dan kepercayaan bahwa korupsi sebagai kejahatan yang merugikan dan merusak kemanusiaan serta pembangunan. Pada tingkatan ini bahkan terbangun motivasi untuk mengedukasi dan mengadvokasi lingkungan akan pentingnya pemberantasan korupsi dan munculnya keberanian untuk melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang.

Efektivitas
perempuan
sebagai istri dan
ibu di dalam
keluarga inti.

4. Mekanisme Internalisasi Nilai Antikorupsi

Para perempuan perlu memahami bahwa efektivitas perempuan sebagai istri dan ibu di dalam keluarga inti, maupun di keluarga luas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Demikian juga pemahaman mengenai mekanisme internalisasi antikorupsi sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Gambar 3 menunjukkan visualisasi rangkaian tahapan dalam proses internalisasi hingga tujuan tercapai. Proses tersebut dapat dijadikan rujukan pendidikan antikorupsi dalam keluarga hendaknya dilakukan dengan metode, teknik yang tepat, dan memadai.

Nilai antikorupsi sebagai stimulus edukasi yang diawali oleh sosialisasi, kemudian internalisasi terjadi pada saat stimulus tersebut melewati ingatan jangka pendek. Pada akhirnya, masuk dalam ingatan jangka panjang. Selanjutnya mendapat interpretasi, persepsi, dan perilaku. Hal tersebut disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3
Tahap dan efektivitas internalisasi sebagai bagian dari
proses pendidikan⁸

⁸ Sunarti E, R Purwani. 2005. Ajarkan Anak Keterampilan
Hidup Sejak Dini. Jakarta: Elex Media Komputindo.

5. Efektivitas Proses Internalisasi

Agar pesan-pesan antikorupsi diterima dengan baik, para perempuan perlu memperhatikan efektivitas proses internalisasi dalam keluarga. Pesan antikorupsi perlu dirumuskan secara tepat karena secara alami tidak semua pesan stimulus edukasi dapat diterima oleh sasaran. Ada proses pemilihan pesan antikorupsi mana yang dilanjutkan untuk diproses dan mana yang ditahan atau bahkan ditolak. Terdapat proses seleksi dalam penerimaan pesan (selective reception), seleksi pesan untuk masuk ingatan jangka panjang (selective retention), seleksi kumpulan pesan-pesan untuk dipersepsikan (selective perception), dan seleksi untuk diinterpretasikan dalam bentuk sikap dan aksi serta perilaku (selective interpretation).

6. Nilai Antikorupsi

Nilai-nilai antikorupsi apa saja yang perlu diinternalisasikan dalam keluarga? KPK menetapkan sembilan nilai antikorupsi, yaitu nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jika dikelompokkan, kesembilan nilai-nilai antikorupsi tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok atau tiga aspek dalam nilai-nilai antikorupsi, yaitu:

a.

Aspek Inti

meliputi nilai jujur, disiplin, tanggung jawab.

b.

Aspek Etos Kerja

meliputi nilai kerja keras, sederhana, mandiri.

c.

Aspek Sikap

meliputi adil, berani, peduli.

- **Jujur** adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, serta mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, dan tidak berbohong.
- **Disiplin** adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan.
- **Tanggung jawab** adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.
- **Kerja keras** adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan dengan sebaik-baiknya berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang, dan berusaha.
- **Sederhana** adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan.
- **Mandiri** adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi.
- **Peduli** adalah sikap dan tindakan memerhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar.
- **Adil** berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.
- **Berani** adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar.

7. Persepsi Antikorupsi Perempuan

Harapan atau bahkan tuntutan kepada perempuan berperan dalam internalisasi nilai antikorupsi di keluarga, perlu diperkaya dengan gambaran mengenai persepsi antikorupsi pada para perempuan itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari indeks yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) maupun survei mandiri yang dilakukan berbagai pihak.

IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi) Menurut Dimensi dan Jenis Kelamin 2013–2015

Dimensi IPAK	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Menurut Dimensi dan Jenis Kelamin								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Indeks Persepsi	3,70	3,76	3,78	3,62	3,68	3,68	3,66	3,71	3,73
Indeks Pengalaman	3,60	3,50	3,43	3,57	3,48	3,36	3,58	3,49	3,39
IPAK	3,66	3,64	3,63	3,60	3,59	3,55	3,63	3,61	3,59

Sumber:
bps.go.id
Indeks Perilaku Anti Korupsi
(IPAK) Menurut Dimensi
dan Jenis Kelamin
2013–2015

BPS menganalisis nilai IPAK antara laki-laki dan perempuan. Data Tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan IPAK laki-laki lebih tinggi dari IPAK perempuan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Demikian hasilnya konsisten untuk indeks persepsi maupun indeks pengalaman. Hal ini diduga karena laki-laki memiliki indeks pengalaman perilaku korupsi lebih tinggi sehingga indeks persepsi antikorupsinya pun lebih tinggi.

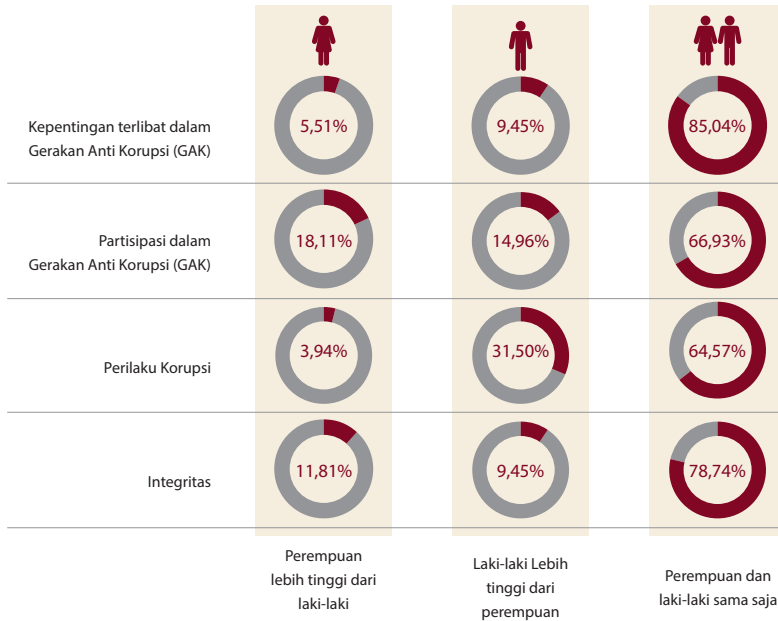
Hal ini diduga karena laki-laki memiliki indeks pengalaman perilaku korupsi lebih tinggi sehingga indeks persepsi antikorupsinya pun lebih tinggi.

Hasil IPAK yang dilakukan BPS berbeda dengan pandangan umum dan sejumlah penelitian terhadap perilaku bahwa wanita lebih layak dipercaya dan berjiwa publik daripada pria. Publik memandang bahwa perempuan akan efektif dalam mempromosikan pemerintahan yang jujur⁹. Perempuan lebih berperilaku untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dibanding laki-laki. Hal ini terlihat dari banyaknya indikator yang dimiliki perempuan dalam pemberantasan korupsi yang lebih unggul dibanding laki-laki¹⁰.

Penulis melakukan survei mandiri secara online dengan jumlah responden sebanyak 127 orang (laki-laki dan perempuan) yang dikumpulkan selama 4 hari. Hasil survei tersebut dilakukan untuk memperoleh persepsi responden mengenai nilai integritas, perilaku korupsi, keterlibatan dalam gerakan antikorupsi, kepentingan untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi antara laki-laki dan perempuan, religius, perilaku jujur, materialistik, serta gaya hidup konsumtif yang disajikan pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.

⁹ Dollar D, Fisman R, Gatti R. 2001. Are women really the "fairer" sex? Corruption and women in government. *Journal of Economic Behavior & Organization* 46(4): 423–429. [https://doi.org/10.1016/S0167-2681\(01\)00169-X](https://doi.org/10.1016/S0167-2681(01)00169-X)

¹⁰ Martha AE. 2013. Gender dan korupsi (Pengaruh kesetaraan gender DPRD dalam pemberantasan korupsi di Kota Yogyakarta). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(4): 580–601.



Gambar 4

Persepsi perilaku integritas, korupsi, partisipasi dan kepentingan terlibat dalam pemberantasan korupsi antara laki-laki dan perempuan

Hasil survei menunjukkan bahwa pada masing-masing butir pertanyaan, persentase terbesar responden memandang bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama saja dalam hal nilai integritas (78,7%), perilaku korupsi (64%), partisipasi dalam gerakan antikorupsi (67%), dan kepentingan terlibat dalam pemberantasan korupsi (85%). Namun dalam hal perilaku korupsi, 31%

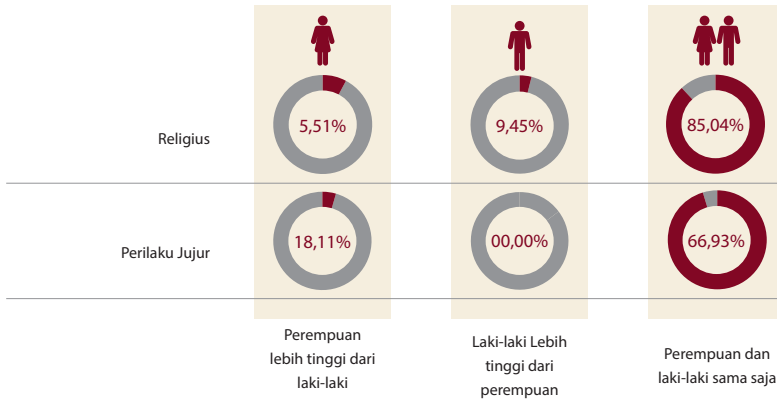
responden menyatakan laki-laki lebih banyak terlibat korupsi dibandingkan perempuan. Data KPK menunjukkan bahwa dari seluruh kasus korupsi yang ditangani sejak 2004 sampai 2021, terdapat 10,57% (118 kasus dari 1116 kasus) yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku utama maupun yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa mayoritas koruptor (90%) adalah laki-laki.

Integritas merupakan nilai penting antikorupsi, bahkan nilai-nilai antikorupsi sendiri sering kali diwakili oleh nilai integritas. Integritas adalah bertindak konsisten dengan apa yang dipikirkan dan dikatakan. Integritas dapat berperan dengan baik dalam upaya pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap antikorupsi.

Integritas sering diartikan sebagai menyatunya pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan. Jika merujuk dari asal katanya, kata integritas memiliki makna berbicara secara utuh dan lengkap. Dengan demikian integritas memiliki tiga komponen yang merupakan satu paket, yaitu 1) kepercayaan, persepsi, pikiran, 2) perkataan, serta 3) perbuatan.

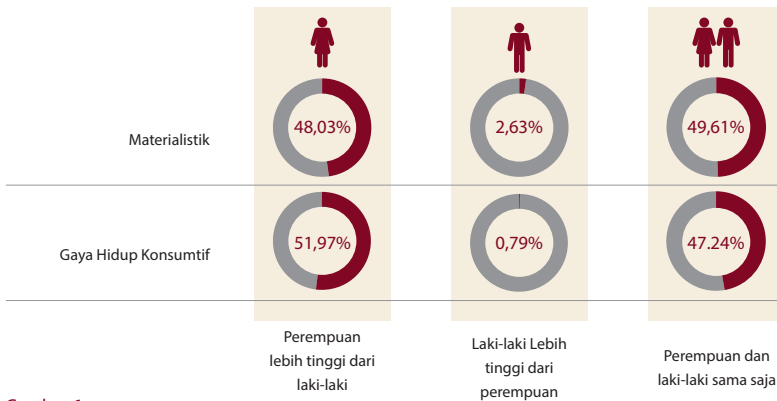
Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya (Wikipedia). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin “integer” yang berarti:

- Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.
- Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.



Gambar 5

Persepsi perilaku religius dan jujur antara laki-laki dan perempuan



Gambar 6

Persepsi gaya hidup materialistik dan konsumtif antara laki-laki dan perempuan

Hasil survei perilaku religius dan perilaku jujur (Gambar 5) antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa perilaku religius dan kejujuran tidak terkait jenis kelamin, sama saja antara

laki-laki dan perempuan, tergantung individunya. Namun yang menarik dari data survei menunjukkan bahwa ada persentase kecil yang menyatakan perempuan lebih jujur dibandingkan perempuan, dan tidak ada yang menyatakan sebaliknya.

Dalam hal perilaku religius, selain mayoritas menyatakan tergantung pada individunya, sama saja pada laki-laki maupun perempuan, terdapat persentase kecil responden yang menyatakan bahwa perempuan lebih religius. Demikian juga persentase yang lebih kecil bahwa justru laki-laki yang lebih religius.

Hasil survei mandiri mengenai gaya hidup materialistik dan konsumtif antara laki-laki dan perempuan pada Gambar 6 menunjukkan setengah

responden menyatakan bahwa perempuan lebih materialistik juga lebih konsumtif dibandingkan laki-laki. Namun demikian hampir setengah responden lainnya menyatakan bahwa gaya materialistik maupun konsumtif sama saja bisa terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, tergantung pada individunya, tidak terkait dengan jenis kelaminnya. Hanya persentase yang sangat kecil menyatakan bahwa laki-laki lebih konsumtif dan materialistik dibanding perempuan.

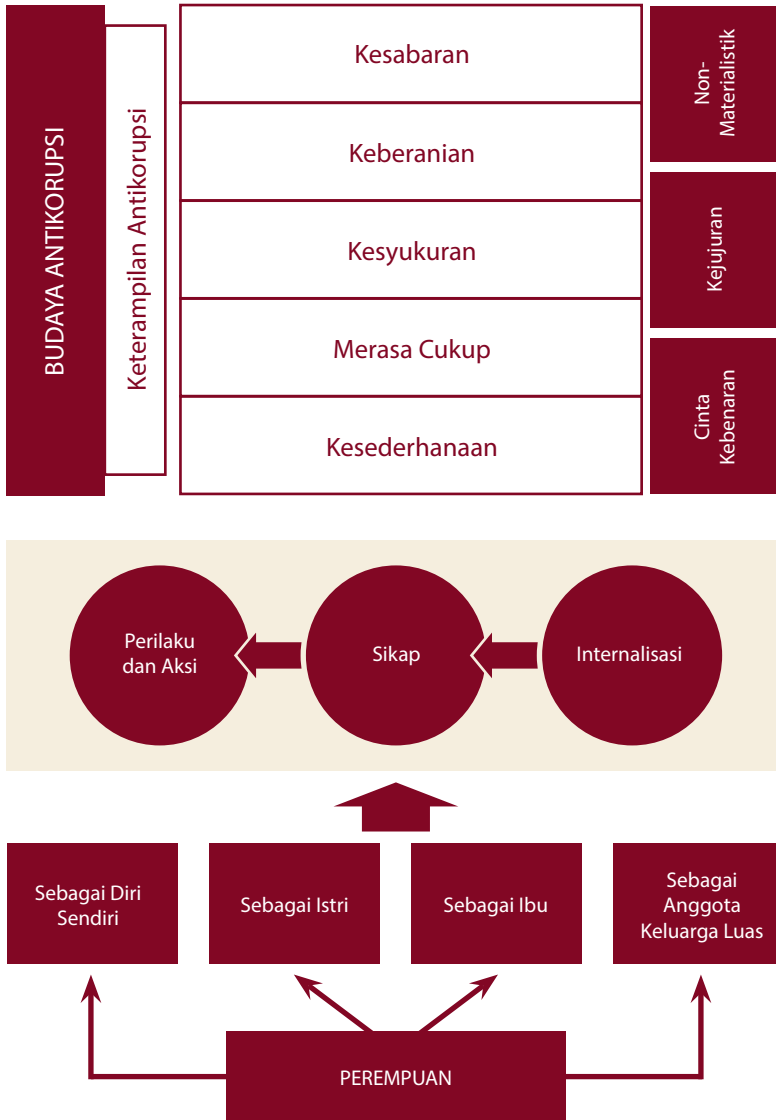
8. Kerangka Kerja Perempuan Bangun Keluarga Antikorupsi

Penulis memvisualisasikan ringkasan peran perempuan dalam internalisasi nilai antikorupsi sehingga terbentuk sikap dan perilaku bahkan budaya antikorupsi dalam keluarga sebagaimana disajikan pada Gambar 7.

Menurut penulis, terdapat dua tingkatan nilai antikorupsi yang relevan diinternalisasikan oleh perempuan, baik dalam peran utamanya sebagai istri dan ibu, juga diperluas termasuk sebagai diri sendiri dan sebagai anggota dari keluarga luas (extended

family). Tingkat pertama adalah peran utama dan mendasar yaitu meliputi tiga nilai, yaitu cinta kebenaran, kejujuran, dan non-materialistik.

Tingkat nilai kedua adalah turunan dari nilai utama sehingga selain menunjukkan nilai juga menunjukkan kedekatan dalam aksi implementasinya. Nilai turunan ini terdiri atas lima nilai, yaitu: kesederhanaan, kecukupan & merasa cukup, kesyukuran, keberanian, dan kesabaran.



Gambar 7

Ringkasan peran perempuan bangun budaya antikorupsi di keluarga

Nilai
non-materialistik
menjadi nilai dasar
antikorupsi.

Keterampilan antikorupsi perempuan dalam keluarga merupakan syarat pendukung perwujudan keluarga antikorupsi.

Keterampilan tersebut meliputi keterampilan perempuan dalam mengelola sumber dayanya, baik yang dimiliki maupun yang tidak dimiliki namun dapat diakses keluarga. Selain itu, keterampilan dalam mengambil keputusan, keterampilan dan kearifan dalam berkonsumsi, serta menjadi konsumen.

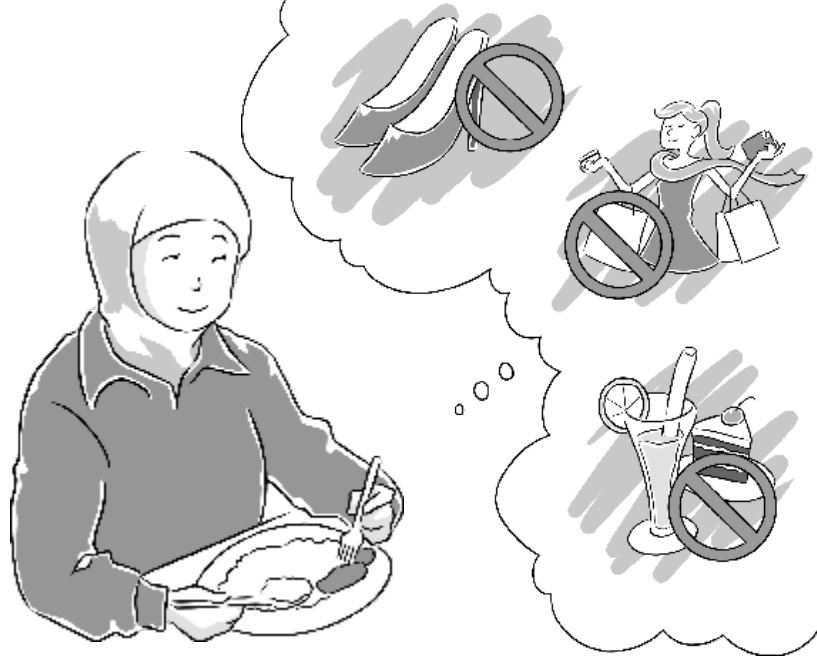
Nilai non-materialistik menjadi nilai dasar antikorupsi. Nilai ini akan membawa perempuan sebagai istri dan ibu untuk tidak bergaya hidup hedonis dan konsumtif, mampu membedakan mana kebutuhan dari keinginan, mengutamakan pemenuhan kebutuhan dari keinginan, mengetahui kebutuhan yang strategis dan prioritas, serta mengutamakan pemenuhannya. Membentuk budaya keluarga antikorupsi melalui internalisasi nilai non-materialistik dengan cara:

1. Hindari gaya hidup hedonis yang hanya berorientasi pada pemenuhan kesenangan semata dan mengabaikan pertimbangan kemanfaatan dan risiko;
2. Hindari perilaku konsumtif yang cenderung boros berlebihan, dan mengutamakan keinginan daripada kebutuhan; serta
3. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan daripada pemenuhan keinginan yang sering kali tidak terbatas dan bukan yang prioritas.

Berikut beberapa peran perempuan sebagai istri dalam membangun keluarga antikorupsi.

Meningkatkan pengetahuan dan perolehan informasi untuk pengambilan keputusan penggunaan sumber daya yang tepat, efektif, dan produktif.

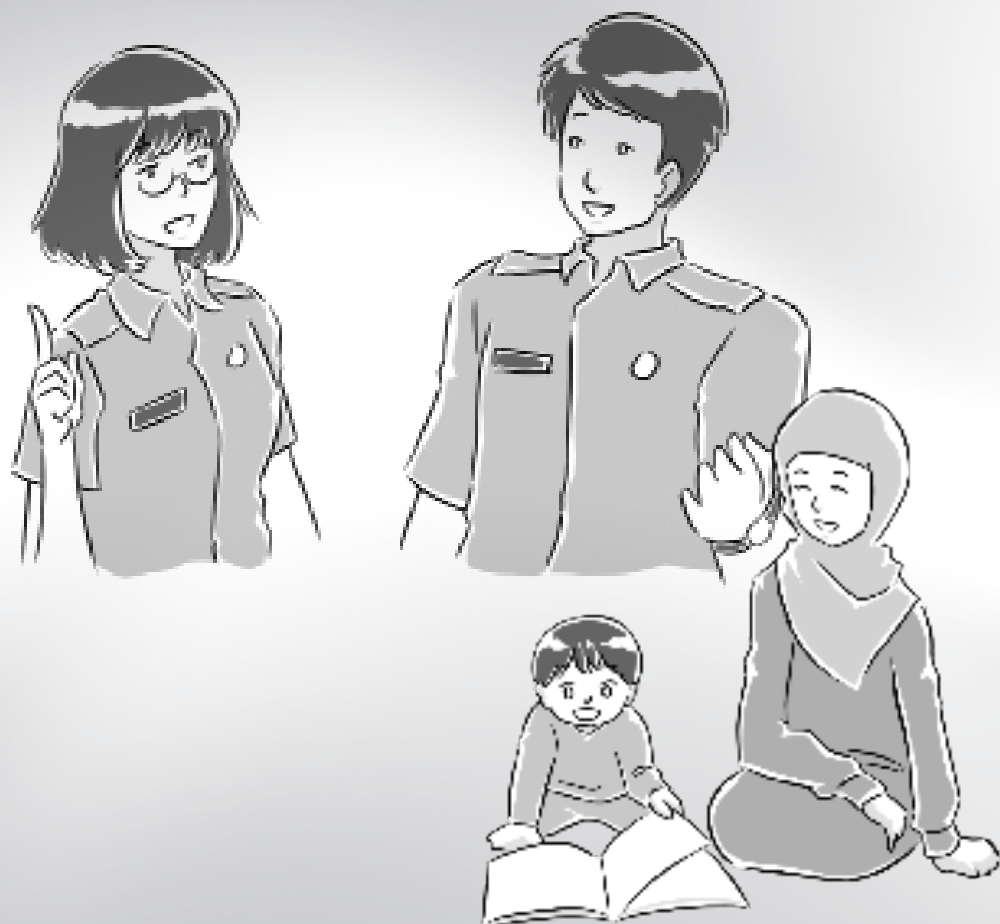
1. Bersama suami berbagi visi, misi dan tujuan kehidupan keluarga;
2. Saling berkomitmen untuk selalu jujur dan mencari nafkah halal bagi keluarga;
3. Memperkuat, mendorong, dan mendukung suami untuk hanya antikorupsi;
4. Memotivasi prestasi kerja suami, sebagai dasar perolehan reward dan pendapatan halal bagi keluarga;
5. Menolak pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun yang memiliki kepentingan mempengaruhi suami di tempat kerja;
6. Tidak memberikan uang atau fasilitas kepada siapa pun dalam rangka kelancaran urusan;
7. Berkomitmen bersama suami untuk menolak suap dan menyuap untuk kepentingan kelancaran berbagai urusan dalam keluarga, khususnya pekerjaan suami;
8. Tidak menggunakan fasilitas kantor suami untuk kepentingan pribadi dan keluarga;
9. Meningkatkan literasi dan keterampilan pengelola keuangan keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.



Gambar 8
Gaya hidup non-materialistis

Berikut beberapa implementasi peran perempuan sebagai ibu dalam mengajarkan anak-anaknya untuk memiliki nilai, sikap, dan perilaku antikorupsi.

1. Selalu jujur dan mencintai kebenaran;
2. Hemat dalam penggunaan uang dan barang;
3. Menjalankan pola hidup sederhana tidak bermewah-mewahan;
4. Menjauhi gaya hidup hedonis dan konsumtif;
5. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki;
6. Bersyukur atas kondisi yang ada;
7. Tidak mengambil hak orang lain;
8. Menolak pemberian dari orang yang tidak dikenal;
9. Tidak melakukan suap dalam bentuk apa pun.



BAB 4

PERAN PEREMPUAN BANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI

Bab empat menguraikan peran ketiga perempuan dalam gerakan pemberantasan korupsi yaitu membangun budaya antikorupsi di lingkungan eksternal keluarga, yaitu



di lingkungan tempat tinggal, di komunitas-komunitas yang diikuti, di lingkungan pertemanan peer group, di lingkungan kerja, di lingkungan lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian ini membahas dua hal, yaitu membahas mengenai budaya antikorupsi dan membahas peran perempuan dalam membangun budaya antikorupsi.

1. Budaya Antikorupsi

Hasil investasi masyarakat luas dalam jangka lama

Budaya
mempengaruhi
kehidupan
manusia,
mempengaruhi
nilai dan cara
pandang, beragam
aksi turunan dan
pengambilan
keputusan
manusia.

Istilah budaya sudah menjadi istilah umum yang digunakan disampaikan beragam pihak di beragam kesempatan. Bagi masyarakat umum, ketika mendengar atau mengucapkan kata “budaya” maka yang terbayang dalam benaknya yaitu berupa tari-tarian dengan menggunakan baju daerah, diiringi lagu, serta musik tradisional. Budaya dapat ditunjukkan pula melalui artefak atau acara-acara ritual. Selain itu, budaya juga melekat kesan masyarakat dari etnis tertentu berkomunikasi dengan bahasanya dan memiliki cara hidup yang khas.

Budaya bukan sesuatu yang dihasilkan dalam waktu sesaat, melainkan merupakan hasil investasi jangka panjang, diwujudkan dalam karya, cipta, dan karsa, baik yang dapat terlihat seperti benda dan barang, maupun yang tidak terlihat seperti nilai kepercayaan, norma, dan lain-lain. Budaya dibangun oleh semua individu, keluarga, dan masyarakat, serta sebaliknya budaya mempengaruhi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Budaya mempengaruhi kehidupan manusia, nilai dan cara pandang, beragam aksi turunan, serta pengambilan keputusan manusia.

Budaya juga merupakan hasil karya, karsa, dan cipta lembaga yang berakar dari nilai-kepercayaan, sikap mental, komitmen, dedikasi, loyalitas, bahkan bisa juga pengorbanan setiap personil yang ada dalam lembaga. Pengertian lainnya, budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang tercermin, baik dalam wujud fisik maupun

nonfisik yang sering kali berupa pemikiran dan konsep yang bersifat abstrak. Budaya meliputi asumsi-asumsi dasar dan keyakinan-keyakinan di antara para anggota masyarakat, kelompok, komunitas, dan organisasi. Budaya juga dapat dilihat sebagai suatu perilaku, nilai-nilai, sikap hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan dan cara memandang persoalan serta pemecahannya.

Lantas apa yang dimaksud dengan budaya antikorupsi?

Penulis mendefinisikan budaya antikorupsi sebagai suatu kondisi hasil karya, karsa, serta cipta individu, keluarga, masyarakat, lembaga, dan organisasi yang dilandasi nilai yang kokoh, kepercayaan yang ajeg karena dibangun oleh pengetahuan yang telah dipahami secara mendalam. Hingga akhirnya, membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang memandang buruk korupsi dan memberikan sanksi sosial kepada koruptor, serta menolak segala bentuk korupsi yang merugikan dan berdampak buruk bagi masyarakat luas.

Visi, syarat, dan prinsip membangun budaya antikorupsi

Visi yang ingin dicapai dari pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia yang bersih dari tindakan korupsi sehingga masyarakat lebih sejahtera dan ketimpangan sosial-ekonomi rendah. Pemberantasan korupsi menjadi sarana agar masyarakat Indonesia mendapatkan kehidupan yang lebih baik, memenuhi panggilan nurani agar terwujudnya keadilan sosial.

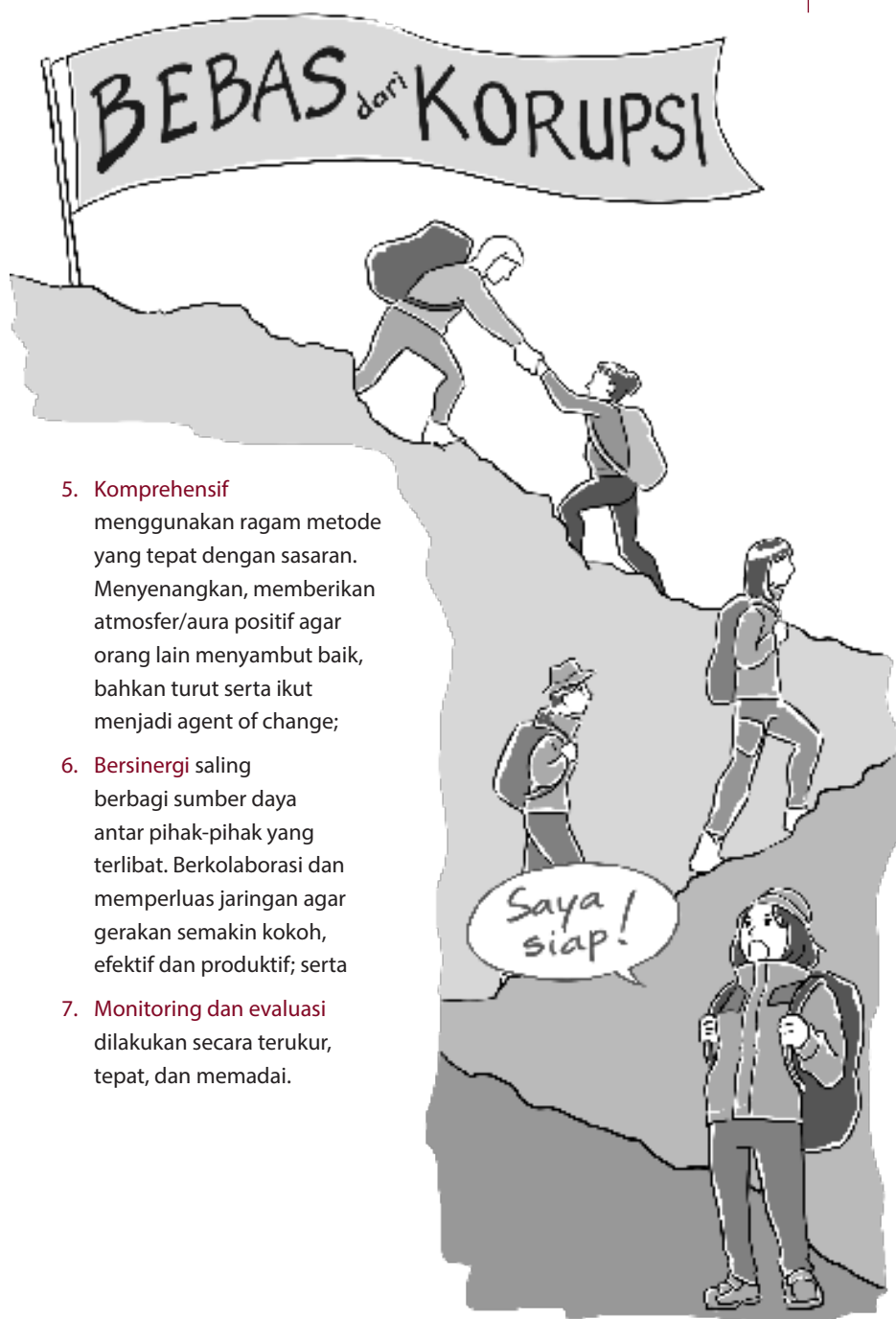
Pencapaian visi tersebut tentunya ada prasyaratnya, yaitu keterlibatan banyak pihak dalam upaya pemberantasan korupsi dan menjadikan antikorupsi sebagai budaya. Salah satu pihak yang sudah seharusnya dapat terlibat aktif yaitu perempuan. Oleh karenanya, perlu mengoptimalkan peran perempuan dalam pemberantasan korupsi, baik di rumah maupun di luar rumah (di lingkungan ketetanggaan, grup sebaya, komunitas, dan lingkungan masyarakat luas).

Apa syarat membangun budaya antikorupsi?

Syarat keharusannya yaitu adanya kelompok masyarakat yang memiliki nilai antikorupsi yang kokoh, kesadaran tinggi, dan komitmen yang kuat, serta ditindaklanjuti oleh aksi nyata yang dilakukan secara konsisten, persisten, dan tidak mudah menyerah.

Prinsip membangun budaya antikorupsi.

1. **Membangun** sistem nilai yang kokoh sebagai landasan peningkatan kesadaran dan komitmen, serta peran serta aktif dalam pemberantasan korupsi;
2. Program **terpadu dan terintegrasi** dalam berbagai program yang sudah ada sehingga lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya;
3. **Strategi** yang berorientasi atau fokus pada pencapaian tujuan dengan menggunakan indikator terukur, benar dan dapat diandalkan;
4. Berkelanjutan, dilakukan dengan **teguh pendirian**, terus-menerus, konsisten dan persisten, hingga tujuan akhir tercapai;



5. **Komprehensif**
menggunakan ragam metode yang tepat dengan sasaran. Menyenangkan, memberikan atmosfer/aura positif agar orang lain menyambut baik, bahkan turut serta ikut menjadi agent of change;
6. **Bersinergi** saling berbagi sumber daya antar pihak-pihak yang terlibat. Berkolaborasi dan memperluas jaringan agar gerakan semakin kokoh, efektif dan produktif; serta
7. **Monitoring dan evaluasi** dilakukan secara terukur, tepat, dan memadai.

Komponen Budaya Antikorupsi

Komponen budaya antikorupsi merupakan bagian yang harus ada dan diperlukan untuk membangun budaya yang menempatkan korupsi sebagai hal buruk dan harus dihindari bahkan diberantas. Komponen tersebut meliputi:

- 1 Nilai dan Norma sosial
- 2 Kecukupan ekonomi
- 3 Modal sosial
- 4 Keadilan sosial
- 5 Aturan dan hukum
- 6 Kelembagaan sosial
- 7 Sanksi sosial
- 8 Jejaring sosial

Dengan demikian ragam kerja dalam membangun budaya antikorupsi bersifat kompleks terkait aspek kehidupan sosial ekonomi yang luas namun mendasar dan berakar, yaitu berkaitan dengan:

1 Meningkatkan, menguatkan, dan/atau memelihara nilai dan norma sosial, khususnya menghilangkan nilai hidup materialistik, budaya hedonis, dan perilaku konsumtif;

2 Membangun, meningkatkan, dan/atau mendorong ekonomi berkecukupan (economic adequacy) dan mencegah ketimpangan yang lebar antar kelompok masyarakat untuk menutup atau mengurangi salah satu faktor penyebab korupsi;

3 Menguatkan, meningkatkan, memelihara, memulihkan modal sosial seperti kerja sama dan gotong-royong. Demikian juga trust atau rasa percaya antarwarga masyarakat secara horizontal, maupun secara vertikal kepada pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat;

4 Mendukung dan mendorong penegakan hukum tindak pidana korupsi secara adil tanpa pandang bulu, mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum, dan berperan aktif dalam penegakan hukum korupsi dengan berani melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana korupsi;

5 Membangun, menguatkan, memelihara kelembagaan sosial agar berperan dan berfungsi, serta turut ambil bagian dalam pemberantasan korupsi dan membangun budaya antikorupsi; serta

6 Mengembangkan sanksi sosial (reward and punishment) dengan tidak memberi ruang untuk menerima apalagi mengapresiasi koruptor di masyarakat, tidak menerima sumbangan hasil korupsi, akhirnya memandang korupsi sebagai perbuatan buruk dan hina.



2. Peran Perempuan dalam Membangun Budaya Antikorupsi

Multiperan & Multibentuk Peran Perempuan

Perempuan memiliki multiperan dan berpeluang menjalankan berbagai bentuk partisipasi dalam pemberantasan korupsi. Dinyatakan multiperan karena perempuan pada dasarnya memiliki lebih dari satu lingkungan eksternal keluarga yang dapat menjadi sarana pemberantasan korupsi. Lingkungan di mana perempuan ada dan terlibat di dalamnya yaitu:

- lingkungan pertetanggaan dan masyarakat sebagai wilayah tempat tinggal;
- lingkungan kerja (bagi yang bekerja menjalankan fungsi instrumental);
- lingkungan pertemanan dan sahabat dekat (peer group);
- lingkungan pertemanan dan komunitas media sosial;
- lingkungan komunitas lokal yang menekankan pertemuan langsung; serta
- lingkungan kelembagaan masyarakat dan/atau organisasi formal.



Lingkup Makna Korupsi

Bagian penting yang diinternalisasikan dalam membangun budaya antikorupsi yaitu dimulai dari pemahaman mengenai lingkup korupsi. Pada umumnya, masyarakat umum memaknai korupsi secara terbatas yaitu ketika seseorang mengambil uang dari kantor yang bukan miliknya. Masih ada masyarakat yang memandang kalau menyuap sebagai kejahatan lain dan bukan bagian dari korupsi. Apalagi pemahaman mengenai gratifikasi (pemberian) dan menyalahkan jabatan atau kewenangannya turut memperkaya orang lain, belum begitu banyak dipahami sebagai bagian dari korupsi.¹¹

Berikut ragam pengertian korupsi yang terdapat dalam berbagai dokumen:

1. Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001:597).
2. Perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral (Kamus Umum Bahasa Indonesia).
3. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).
4. Korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap. Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara.
5. Perilaku merugikan negara atau institusi, baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri.
6. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugasnya.

¹¹ Hasil observasi dan expert judgement penulis sebagai sosiolog

Ragam bentuk partisipasi perempuan dalam pemberantasan korupsi, bisa dengan melakukan satu atau semua dari bentuk partisipasi aktif berikut:

1

Sebagai **edukator**, menekankan pada peningkatan pengetahuan, pemahaman, pembentukan sikap hingga perilaku atau aksi antikorupsi;

2

Sebagai **inisiator** yang memiliki ide dan mewujudkannya menjadi inisiasi aksi-aksi atau upaya terkait pemberantasan korupsi;

3

Sebagai **motivator** yang berfungsi mendorong perubahan atau peningkatan komitmen untuk berperan serta aktif dalam pemberantasan korupsi;

4

Sebagai **fasilitator** yang berfungsi memfasilitasi perantara yang menghubungkan berbagai pihak agar upaya atau aksi pemberantasan korupsi berjalan atau terlaksana dengan baik; serta

5

Sebagai **advokator** yang menekankan upaya advokasi dorongan diterimanya rekomendasi kebijakan dan program aksi kepada berbagai lembaga dan organisasi.

Materi-materi yang perlu perempuan kuasai dalam berperan aktif pemberantasan korupsi dengan berbagai peran dan bentuk partisipasinya:

- 1 Argumen kuat mengenai mendesaknya pemberantasan korupsi;
- 2 Argumen kuat mengapa masyarakat harus berperan serta dalam pemberantasan korupsi;
- 3 Data besarnya kerugian akibat korupsi di berbagai bidang;
- 4 Manfaat dan potensi keuntungan akibat tidak ada korupsi;
- 5 Lingkup pengertian korupsi dan penjelasannya;
- 6 Ragam bentuk korupsi yang harus dikenali dan dihindari;
- 7 Nilai antikorupsi dan metode internalisasinya;
- 8 Bentuk strategi pemberantasan korupsi dalam kehidupan sehari-hari; serta
- 9 Ragam bentuk partisipasi perempuan dalam pemberantasan korupsi.

Ragam peran perempuan dalam membangun budaya
antikorupsi di lingkungan eksternal keluarga



Sumber:

Dirumuskan dan divisualisasikan
oleh Sunarti E, Aliya FF, Winny N.

Pemahaman Faktor Penyebab Korupsi

Berikut dua teori yang kontras penyebab terjadinya korupsi:

➔
1

Faktor internal

Teori GONE yang menyatakan bahwa penyebab korupsi meliputi greeds (keserakahan), opportunities (kesempatan), needs (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan) (Bologne 2006).

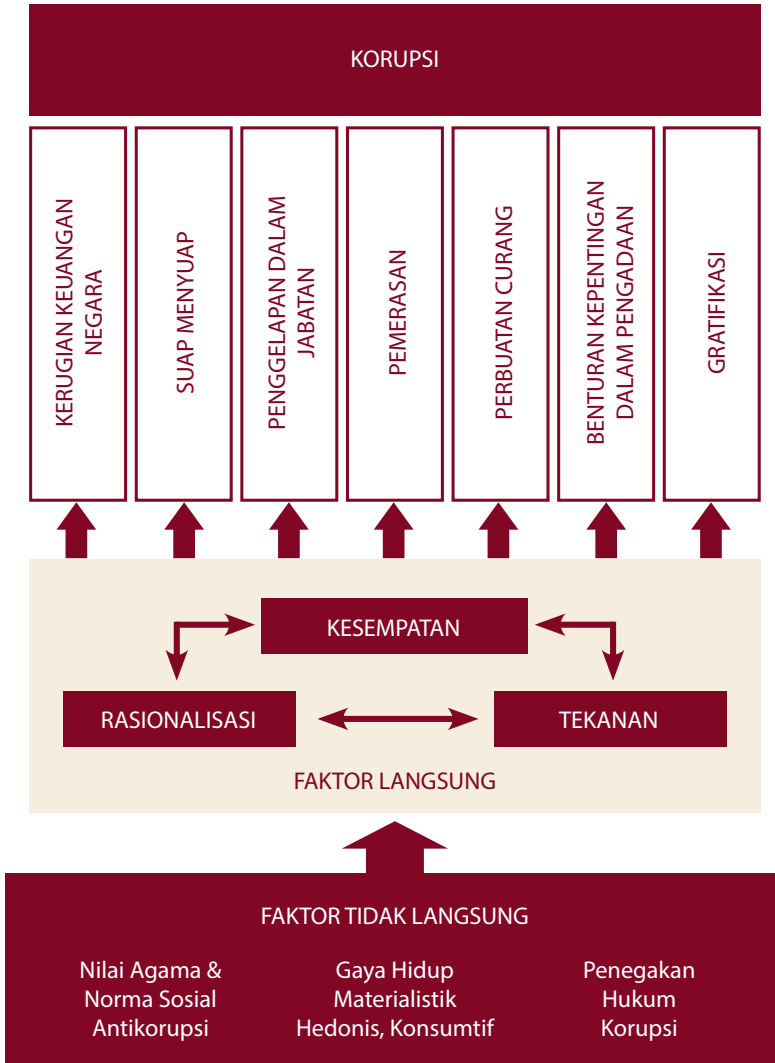
←
2

Faktor eksternal

Korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial. Hal tersebut mengacu teori solidaritas sosial Emile Durkheim (1917) yang memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya; bahwa masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya (Angha 2002).

Penulis memvisualisasikan faktor langsung dan tidak langsung terjadinya korupsi (dengan 7 bentuknya), seperti pada Gambar 9. Faktor langsung menggunakan teori Cressey mengenai The Fraud Triangle¹².

¹² Cressey DR. 1955. Changing criminals: The application of the theory of differential association. *American Journal of Sociology*, 61(2): 116–120. <https://doi.org/10.1086/221691>



Gambar 9 Faktor langsung dan tidak langsung penyebab korupsi

Edukasi Bentuk Korupsi

Mengacu definisi korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2021, ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu:

Kerugian keuangan negara	1
Suap- menyuap	2
Penggelapan dalam jabatan	3
Pemerasan	4
Perbuatan curang	5
Benturan kepentingan dalam pengadaan	6
Gratifikasi	7

Di antara tujuh kelompok bentuk tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, empat bentuk di antaranya dipandang memerlukan penjelasan lebih detail kepada masyarakat. Bentuk korupsi tersebut yaitu kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Korupsi juga merupakan permasalahan sosial karena mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan juga merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan¹³.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*)¹⁴.

¹³ Adji IS. 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Dalam Surono A. 2017. Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. Jakarta: FH-UAI.

¹⁴ Ibid hal 30

Edukasi Tipologi Korupsi

Di berbagai lingkungan yang tepat, seperti di tempat kerja, di komunitas, di lembaga dan organisasi masyarakat, perempuan dapat mengangkat diskusi dan mendalami beragam kajian terkait korupsi. Contohnya mengangkat tema diskusi mengenai tipologi atau bentuk jenis korupsi, yaitu¹⁵:

1. Korupsi transaktif (**transactive corruption**) merupakan jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Biasanya korupsi ini terjadi antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah melalui kebijakan yang dibuatnya.
2. Korupsi perkerabatan (**nepotistic corruption**) merupakan korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk berbagai keuntungan bagi kerabat dan teman-temannya.
3. Korupsi yang memeras (**extortive corruption**) merupakan korupsi yang dipaksakan kepada pihak tertentu yang biasanya disertai dengan ancaman, tekanan ataupun bentuk paksaan lainnya.
4. Korupsi investif (**investive corruption**) merupakan korupsi dalam membentuk memberikan barang dan jasa kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
5. Korupsi defensif (**defensive corruption**) merupakan korupsi di mana pihak yang dirugikan terpaksa terlibat dan yang bersangkutan justru menjadi korban perbuatan korupsi.
6. Korupsi otogenik (**otogenic corruption**) merupakan korupsi yang dilakukan seorang diri, tanpa ada pihak lain yang terlibat.
7. Korupsi suportif (**supportive corruption**) merupakan korupsi yang terjadi dalam bentuk dukungan dengan cara mendiamkan atau berpura-pura tidak tahu atau ikut bersama-sama menikmati hasil korupsi.

¹⁵ Alatas SH diacu IGM Nurdjana. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Dalam Surono A. 2017. Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. Jakarta: FH-UAI.

Amanat Peran Masyarakat

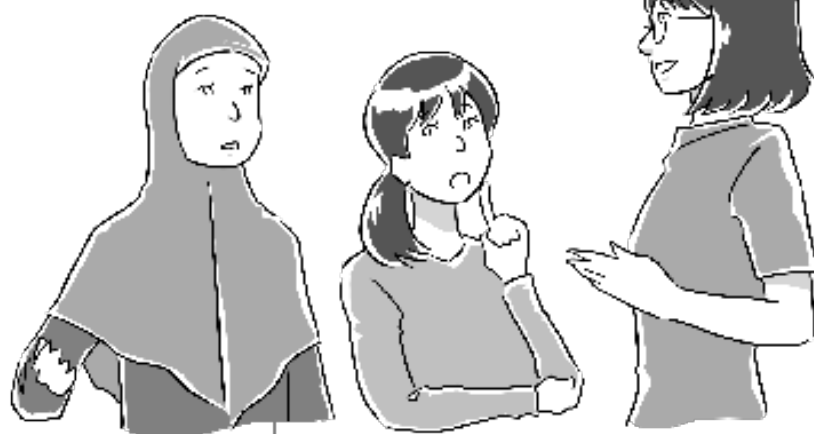
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan **peran serta masyarakat** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bahan yang dapat disampaikan oleh perempuan sebagai edukator adalah mengenai peran serta masyarakat yang diatur undang-undang untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 41 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dan PP No. 43 Tahun 2018. Bentuk **peran serta masyarakat** dalam pemberantasan korupsi dapat berupa:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Kenapa ya hari gini
masih banyak juga
kasus korupsi?

Apa kurang
optimal kalik ya,
pemberantasannya?



Jangan lupa, masyarakat
diharapkan berperan serta,
dan dinyatakan dalam
Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Mengawal sensitivitas Ketidakwajaran perilaku

Dalam perannya sebagai edukator, motivator, inisiator, fasilitator, dan bahkan advokator, para perempuan dapat menggunakan indikator dalam menilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), yaitu persepsi kewajaran atau sebaliknya ketidakwajaran dari suatu tindakan terkait korupsi yang berlaku di seluruh lapisan sistem kehidupan, seperti di keluarga, komunitas, ruang publik.

Ketidakwajaran di lingkungan keluarga

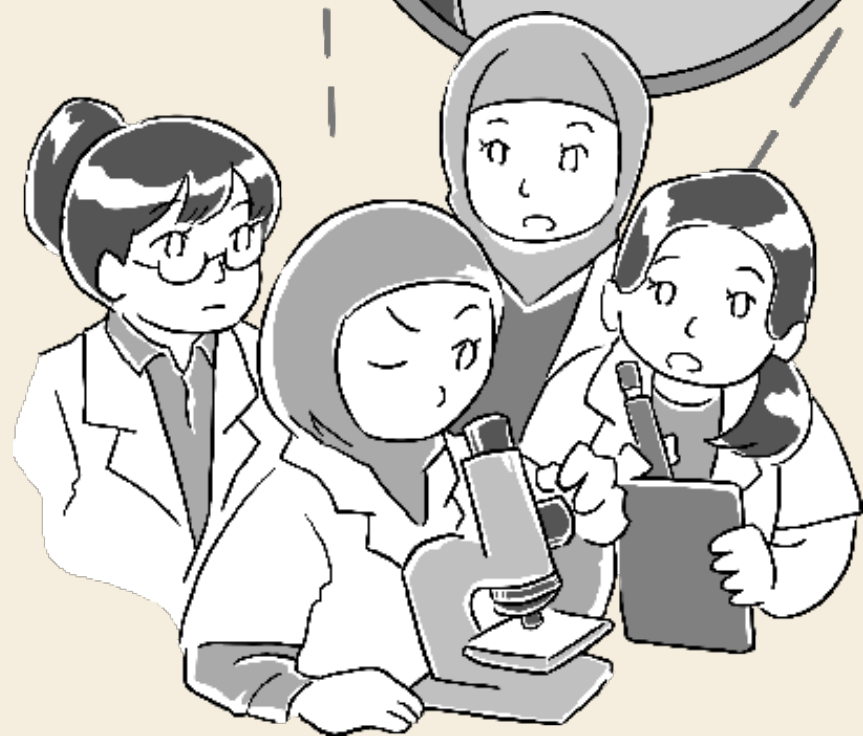
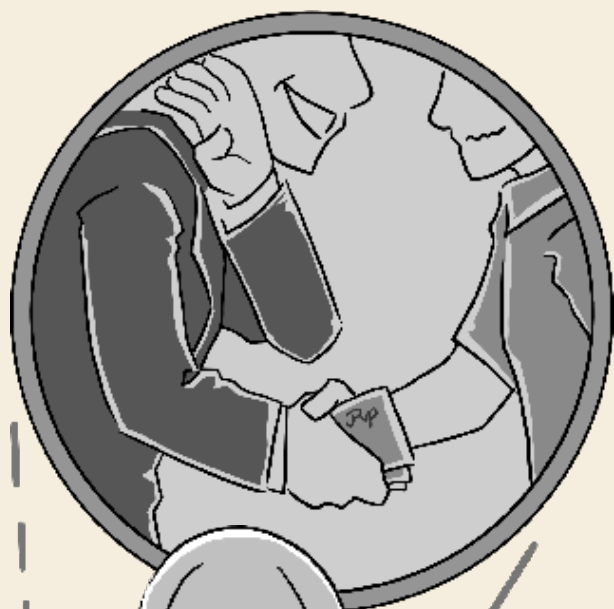
1. Sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami, di luar gaji/penghasilan yang biasa diterima, tanpa mempertanyakan asal-usul uang tersebut.
2. Sikap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga.
3. Sikap orang tua mengajak anaknya dalam kampanye pilkades/pilkada/pemilu demi mendapatkan uang lebih banyak.
4. Sikap seseorang mengambil uang milik anggota keluarga sendiri tanpa seizin pemiliknya.
5. Sikap seseorang menggunakan barang milik anggota keluarga sendiri tanpa seizin pemiliknya.

Menganggap tidak wajar di lingkungan publik

1. Memberi uang/barang/fasilitas dalam proses penerimaan menjadi Aparatur Sipil Negara/pegawai swasta.
2. Memberi uang/barang/fasilitas kepada petugas pelayanan masyarakat untuk mempercepat pengurusan SIM, STNK, SKCK, dan lain-lain.
3. Guru/dosen membantu orang lain yang bukan anggota keluarganya mendapat jaminan (jatah) diterima masuk sekolah/kampus tempat dia mengajar.
4. Memberi uang/barang/fasilitas kepada pihak sekolah/kampus agar anaknya dapat diterima di sekolah/kampus tersebut.
5. Peserta pilkades/pilkada/pemilu membagikan uang/barang/fasilitas ke calon pemilih.

Ketidakwajaran di lingkungan komunitas

1. Sikap Kelompok masyarakat/RT/RW membantu membagikan uang/barang/fasilitas dari peserta pilkades/pilkada/pemilu kepada warga/anggota kelompok.
2. Sikap kelompok masyarakat/RT/RW menerima bantuan/sumbangan/pemberian/hibah dari seseorang tanpa mempertanyakan asal-usulnya.
3. Mantan pejabat pemerintah yang sering membagikan santunan/bantuan/sumbangan tetap dibela masyarakat meskipun masih terlibat kasus korupsi.
4. Ketua RT/RW/kades/lurah mengusulkan semua/sebagian besar warganya untuk mendapatkan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin meskipun tidak sesuai kriteria.
5. Sikap memberi uang/barang/fasilitas kepada pejabat (camat/pegawai kecamatan, lurah/pegawai kelurahan, kades/pegawai kantor desa) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan atau menjelang hari raya keagamaan.



Percepatan dan terobosan budaya antikorupsi

Dengan masih besarnya masalah pemberantasan korupsi dan dampak kerugian yang ditimbulkan sehingga diperlukan upaya yang bersifat percepatan, terobosan, dan berdaya ungkit tinggi dalam membangun budaya antikorupsi.

Perempuan Indonesia selain jumlah dan persentasenya yang hampir sama dengan laki-laki, juga memiliki kapasitas dan peran yang strategis dalam pemberantasan korupsi.

Lebih jauh lagi, para perempuan dapat mengoptimalkan kapasitas, kompetensi, kepemimpinan dan keterampilan managerialnya dalam upaya percepatan pembangunan budaya antikorupsi.

Beberapa upaya percepatan, terobosan, dan berdaya ungkit tinggi pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui:

- **Pengembangan inovasi sosial**

Kreativitas untuk menciptakan inovasi sosial pemberantasan korupsi merupakan hal yang sudah selayaknya dioptimalkan dalam era digital, artifisial inteligen di era Revolusi Industri 4.0 menuju Society 5.0.

- **Pemasaran sosial budaya antikorupsi**

Pemanfaatan prinsip dan pendekatan pemasaran sosial (social marketing) dalam edukasi serta advokasi penanaman nilai, perubahan mindset, dan perilaku. Hal ini mengingat manusia pada dasarnya kikir akan pengetahuan faktual yang empiris dan banyak melakukan seleksi penerimaan dan penahanan stimulus. Demikian pula dalam pemrosesan dan interpretasi hasil proses pengelolaan pesan antikorupsi.

- **Ekosistem antikorupsi**

Membangun budaya antikorupsi dengan mengoptimalkan prinsip ekosistem lingkungan (mikro, meso, hexo, makro)

seperti membangun lapis benteng pemeliharaan nilai antikorupsi dan pertahanan dari serangan dan godaan perilaku korupsi. Demikian akhirnya berani melaporkan tindak pidana korupsi.

- **Organisasi pembelajar**

Membawa komunitas, lembaga, dan/atau organisasi, menjadi organisasi pembelajar. Pada organisasi ini, visi-misi diinternalisasikan, dikuatkan, dan dijadikan penggerak organisasi. Organisasi pembelajar melakukan proses-proses penguatan analisis dan penambahan pengetahuan. Terjadi komunikasi mendalam (deep communication) antara anggota organisasi.

- **Managemen perubahan**

Pemahaman pengetahuan mengenai pola dan arah perubahan serta pengelolaannya agar dapat diarahkan dalam mencapai tujuan. Hal ini berlaku juga dalam perubahan-perubahan terkait pemberantasan dan upaya membangun budaya

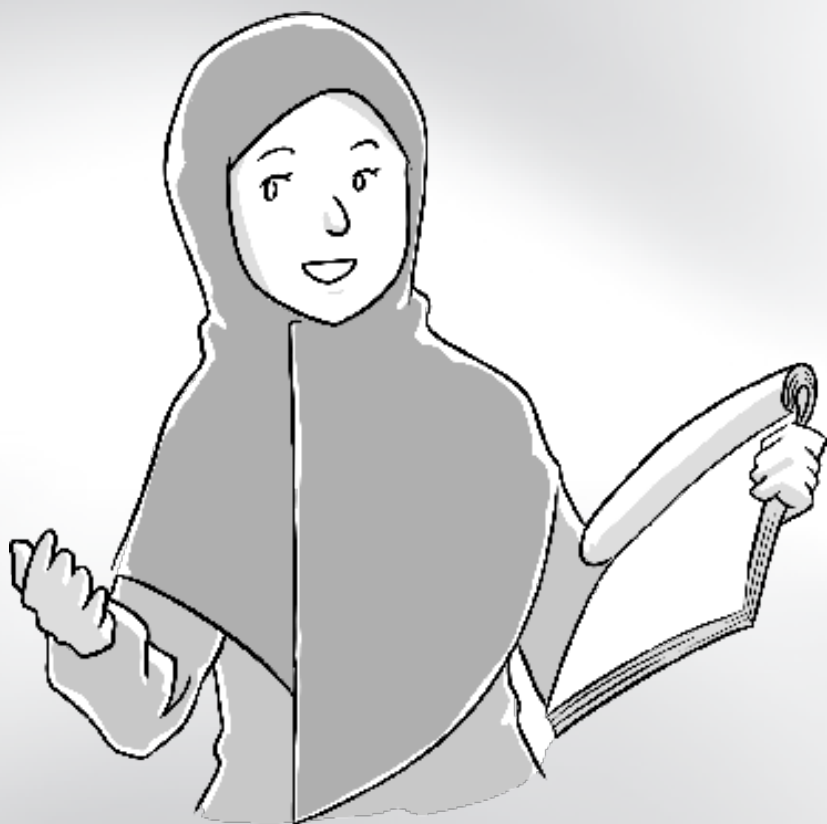
antikorupsi. Respons yang cepat dan tepat terhadap perubahan merupakan salah satu kunci manajemen perubahan. Namun yang lebih utama adalah memprediksi dan mencegah arah perubahan yang tidak diinginkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

- **Pengelolaan pengetahuan pemberantasan korupsi**

Membangun budaya antikorupsi berbasis pengetahuan dengan menggunakan hasil pengelolaan pengetahuan (knowledge management). contohnya menggarap tacit knowledge antikorupsi yang beredar di masyarakat dan mengubahnya menjadi eksplisit knowledge.

- **Masyarakat pengawas korupsi (Corruption watchdog)**

Suatu upaya yang perlu dilakukan untuk memperbesar dan memperluas pengawasan melekat dari masyarakat. Dipandang akan berkontribusi positif dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi.



BAB 5 PILIHAN AKSI

Bagian terakhir dari buku ini menguraikan pilihan aksi sebagai wujud implementasi dari pembahasan bab sebelumnya, yaitu peran perempuan dalam membangun dirinya yang mulia berintegritas, membangun



keluarga antikorupsi, dan membangun budaya antikorupsi di berbagai lingkungan tempat perempuan berada. Pilihan aksi yang diuraikan dalam bab ini merupakan contoh ragam aksi

yang dapat dijadikan sebagai pilihan, namun tentunya masih banyak aksi lainnya yang dapat dilakukan oleh para perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

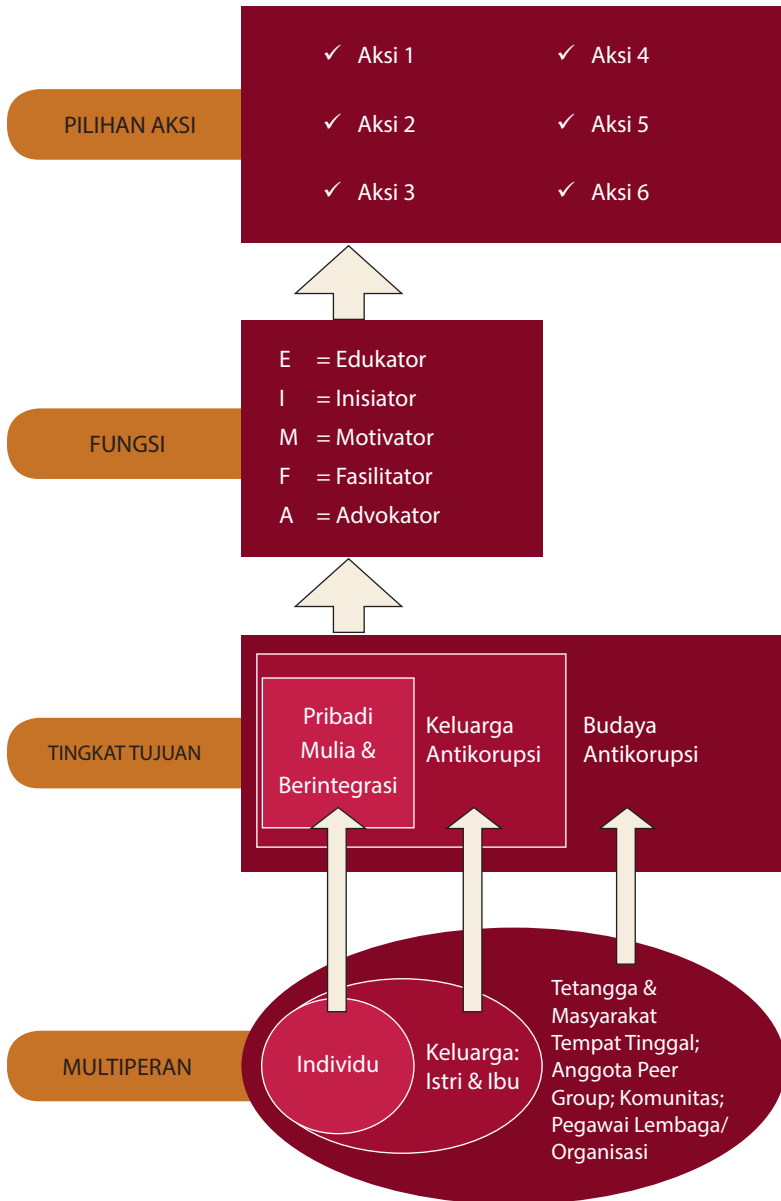
1. Kerangka Kerja Pilihan Aksi Pemberantasan Korupsi

Ragam Pilihan Aksi

Banyaknya kesempatan bagi perempuan melakukan aksi sesuai status dan peran yang mungkin dipilihnya dan diembannya.

Secara sederhana Penulis memvisualisasikan kerangka kerja pilihan aksi perempuan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi sebagaimana disajikan pada Gambar 10. Pilihan aksi tersebut dihasilkan dari pilihan peran dalam rangka mencapai tujuan, dikombinasikan dengan pilihan fungsi.

Kerangka kerja pilihan aksi pada Gambar 10 diuraikan lebih lanjut untuk menunjukkan banyaknya kesempatan bagi perempuan melakukan aksi sesuai status dan peran yang mungkin dipilihnya dan diembannya. Ragam peran tersebut berinteraksi dengan pilihan fungsi dan akan menghasilkan ragam pilihan aksi.



Gambar 10 Kerangka kerja pilihan aksi perempuan dalam pemberantasan korupsi

Suatu aksi antikorupsi bisa dilakukan secara spesifik untuk target dan tujuan khusus serta menjalankan satu fungsi. Namun juga aksi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai lintas generasi, lintas target, dan lintas fungsi (contohnya sebagai edukator sekaligus motivator) sehingga aksi tersebut dapat dikategorikan bersifat generik.

- Pilihan target sasaran aksi antikorupsi:
 - 1) lintas generasi atau per generasi;
 - 2) lintas umur atau per kelompok umur;
 - 3) kelompok khusus (usia, status sosial);
 - 4) komunitas.
- Kelompok sasaran khusus aksi antikorupsi: ibu rumah tangga, wanita karir, para seniman, para guru, pendongeng, aktivis kemasyarakatan, komunitas berbasis agama, seperti para penceramah dan khatib, ibu-ibu pengajian, influencer media sosial.
- Pilihan bentuk aksi antikorupsi: penyuluhan, diskusi terarah, pelatihan, workshop, seminar, pilot project kampung budaya antikorupsi, dan kampanye di media sosial.
- Pilihan wahana distribusi produk kampanye antikorupsi sebagai produk sosial dapat dilakukan melalui pilihan komunikasi personal, komunikasi massa terpilih, dan komunikasi massa.
- Kampanye di media sosial sangat strategis dan banyak pilihan seperti membuat iklan layanan sosial, meme, narasi atraktif, video, dan diskusi interaktif.
- Perbandingan biaya pemasaran sosial melalui komunikasi massa, komunikasi massa terpilih, dan komunikasi personal ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 1 Pilihan aksi dari ragam peran dan ragam fungsi perempuan dalam pemberantasan korupsi

Ragam Peran Perempuan sebagai:		Ragam Fungsi				
		E	I	M	F	A
1	Individu	√	√	√	√	√
2	Ibu	√	√	√	√	√
3	Istri	√	√	√	√	√
4	Tetangga & masyarakat	√	√	√	√	√
5	Peer group	√	√	√	√	√
6	Komunitas	√	√	√	√	√
7	Tempat kerja	√	√	√	√	√
8	Lembaga/organisasi	√	√	√	√	√

Catatan: Fungsi: E = Edukator; I = Inisiator; M = Motivator; F = Fasilitator; A = Advokator

Tabel 2 Perbandingan biaya pemasaran sosial melalui komunikasi massa, komunikasi massa terpilih, dan komunikasi personal

No	Media Komunikasi	Biaya per Kontak (\$)
1	Komunikasi Massa	0,03
2	Komunikasi Selektif	0,25
3	Komunikasi Personal	102,00

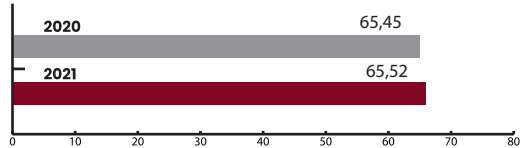
Pilihan Media Komunikasi

Secara umum edukasi membangun budaya antikorupsi oleh perempuan dapat disampaikan melalui media konvensional dengan bertemu langsung tatap muka, atau secara daring, melalui media sosial dan media massa. Kombinasi pilihan media tetap disarankan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan

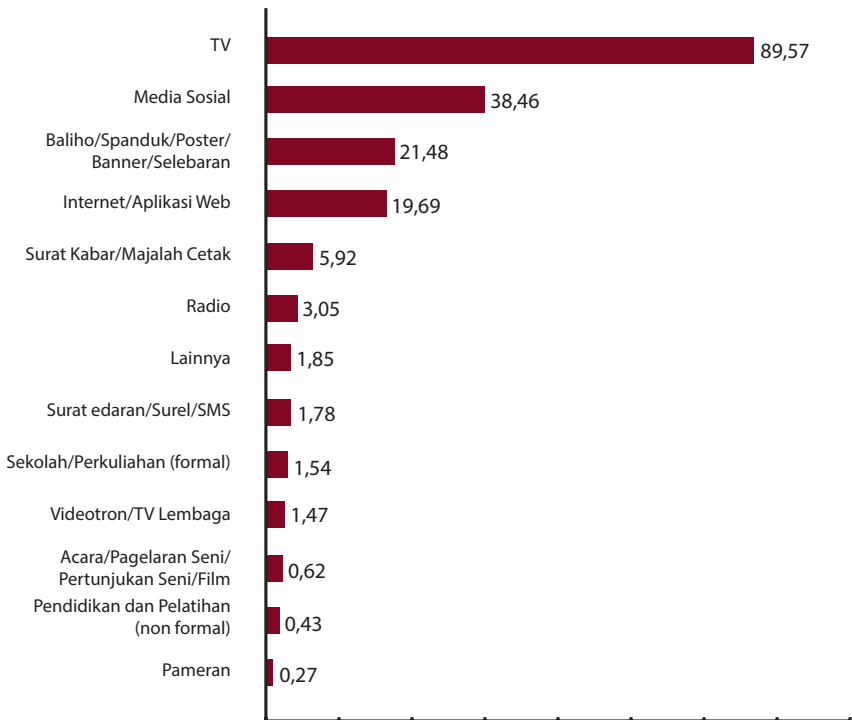
karakteristik sasaran, mengingat sekitar 35% masyarakat belum menerima imbauan dan kampanye mengenai informasi antikorupsi (Gambar 11). Hasil survei menunjukkan masyarakat bisa menerima banyak sumber informasi dari televisi atau media massa sebagai sumber utama informasi mengenai antikorupsi (Gambar 12).

Persentase Masyarakat yang Pernah Mendapatkan
Imbauan/Kampanye Mengenai Informasi Antikorupsi,
Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung, 2020–2021

Gambar 11
Masyarakat yang
mendapat kampanye
antikorupsi Tahun
2020 dan 2021



Persentase Masyarakat Menurut Sumber Kampanye
Antikorupsi yang Diterima, 2021



Gambar 12
Persentase masyarakat menurut sumber kampanye
antikorupsi Tahun 2021

Urutan media sosial
menurut lama
waktu penggunaan:

rata-rata
30,8 jam/bulan



rata-rata
17 jam/bulan



rata-rata
17 jam/bulan



rata-rata
13,8 jam/bulan



rata-rata
8,1 jam/bulan

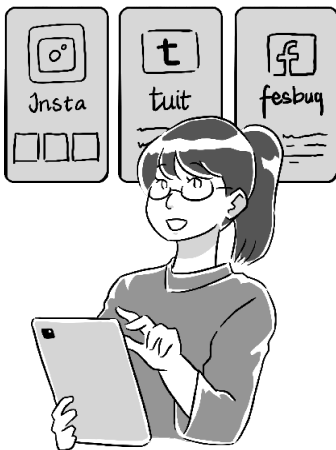


Kampanye melalui Media Sosial

Perempuan dalam melakukan aksi antikorupsi perlu menggunakan media sosial karena penggunaan media sosial saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Kampanye antikorupsi melalui media sosial merupakan pilihan yang strategis saat ini.

Banyak media sosial yang dapat digunakan menyampaikan materi pemberantasan atau antikorupsi mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn dan Tiktok. Selain itu dapat melakukan broadcast chat di Whatsapp, Line, Signal, Telegram dan BiP.

Pada Januari Tahun 2021 dilaporkan lebih dari separuh penduduk di Indonesia (170 juta) telah aktif menggunakan media sosial, dengan penetrasinya sekitar 61,8%¹⁶. Angka pengguna aktif media sosial di Indonesia tersebut tumbuh sebesar 10 juta atau sekitar 6,3% (dibandingkan bulan Januari 2020). Dalam periode yang sama, pengguna internet di Indonesia tumbuh 27 juta (15,5%) menjadi 202,6 juta. Orang Indonesia ternyata rata-rata memiliki 10 akun media sosial. Selain itu, 60% pengguna media sosial memakainya untuk bekerja seperti menjalin relasi dan menjalankan bisnis.



¹⁶ Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital. Agensi marketing We Are Social dan platform manajemen media sosial Hootsuite

- Perempuan dalam melakukan kampanye antikorupsi perlu memperhatikan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan kampanye tersebut. Hasil kajian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kampanye informasi gagal, yaitu:
1. ketidaktahuan yang kronis sehingga kampanye dalam waktu yang terbatas tidak cukup meningkatkan pengetahuan seperti yang diharapkan;
 2. perbedaan individu dalam menerjemahkan dan merespons pesan-pesan;
 3. faktor lingkungan di mana respons individual meningkat manakala terdapat minat dan keterlibatan dari audience lain;
 4. penerimaan individu meningkat manakala informasi yang disampaikan sesuai dengan sikap utama target atau sasaran.

-
- Sebaliknya para perempuan perlu memperhatikan faktor keberhasilan agar kampanye ditangani secara profesional. Keberhasilan komunikasi massa untuk kampanye antikorupsi, berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu:
1. faktor-faktor individu target atau sasaran seperti sikap apatis, defensif, dan keterbatasan kemampuan kognitif.
 2. faktor pesan, seperti pesan yang tidak memberikan keuntungan real yang akan memotivasi sasaran untuk memberikan perhatian dan pemahaman.
 3. faktor media seperti kegagalan dalam menggunakan media yang memadai, pada waktu yang tepat dengan cara yang efektif untuk target spesifik yang sesuai karakteristik media.
 4. faktor mekanisme respons seperti kegagalan untuk menyediakan kelompok masyarakat yang memiliki motivasi dan bersikap menerima dengan cara yang mudah dan nyaman untuk memberikan respons positif terhadap tujuan kampanye.

- Berdasarkan kajian terhadap program pemasaran sosial yang berhasil, terdapat beberapa catatan penting bahwa:
1. suatu kampanye sosial harus memiliki komitmen, stamina, dan disiapkan secara matang;
 2. dibutuhkan kelompok pendukung awal yang dapat menggulirkan difusi produk sosial;
 3. harus memiliki target yang jelas, kegiatan terfokus, serta mobilisasi kekuatan, jumlah personal, dan dana;
 4. kampanye harus dilakukan secara profesional.

Kampanye sosial melalui media massa akan berhasil manakala direncanakan secara efektif, dapat menginformasikan dan memotivasi, serta membawa kepada perilaku yang diharapkan dan berkelanjutan, bahkan dalam ketiadaan intervensi interpersonal sekalipun.

Keberhasilan pemasaran sosial “sesame street” merupakan contoh efektifnya media massa sebagai media kampanye sosial (Kotak 1).

Kotak 1. Keberhasilan kampanye sosial “sesame street”

“KEBERHASILAN PROGRAM SESAME STREET”

- Sesame Street Project (SSP) merupakan pemasaran sosial yang menggunakan: (1) pengujian awal produk pendidikan pra-sekolah, (2) seleksi distribusi yang efektif, dan (3) komunikasi personal secara langsung.
- Proyek ini dilatarbelakangi oleh era pemberantasan kemiskinan di USA pada Tahun 1967. Joan Ganz Cooney, seorang produser public affairs New York City Television station, percaya bahwa peningkatan kemampuan intelektual dan prestasi pendidikan masyarakat miskin merupakan kunci utama pemberantasan kemiskinan. Anak dipandang sebagai target yang tepat memutus kemiskinan melalui pendidikan.
- Pada Maret 1968, Cooney membuat organisasi non-profit yaitu “The Children’s Television Workshop (CTW)”, untuk memproduksi serial “sesame street”. Dalam masing-masing satu jam tayang secara cepat pemain (orang dan boneka) dengan keterampilan yang prima menyampaikan materi alfabet, aritmetik, bagian tubuh, dan penyelesaian masalah. Masing-masing serial berdiri sendiri sehingga tidak masalah bagi anak yang tidak menonton keseluruhan episode.
- Pengembangan desain produk sosial membutuhkan waktu 18 bulan untuk pretesting masing-masing pertunjukan sebelum ditayangkan. Responden yang diuji adalah kelompok target. Pengujian meliputi aspek kualitas siaran dalam mengikat perhatian penonton dan dampak pembelajaran yang diterima target. Hanya episode yang lolos kedua aspek tersebut yang akhirnya ditayangkan.

- Sesame street didistribusikan The Corporation for Public Broadcasting (CPB, jaringan televisi public U.S), namun hanya menjangkau 75% populasi. Jam tayang selama satu jam setiap hari dan anak dapat menontonnya di rumah atau di sekolah. CTW telah mengantisipasi bahwa anak dapat kehilangan beberapa episode. Oleh karenanya, setiap episode diulang beberapa kali dalam satu musim.
- Frekuensi tayang sesame street divariasikan dan ditingkatkan sehingga pada tahun 1972 (dua tahun tayang) telah memiliki reputasi sebagai media pendidikan prasekolah yang populer.
- Evaluator sesame street menggunakan komponen komunikasi personal sebagai suatu uji perlakuan. Kunjungan rumah dilakukan secara acak selama tahun 1970 dan 1971, dengan menggunakan alat promosi majalah, balon, brosur, dan suvenir lainnya. Selama kunjungan komunikator program menekankan pentingnya menonton sesame street. Komunikasi personal dilakukan sebulan sekali melalui kunjungan atau telepon. Responden yang mendapat kunjungan atau telepon meneruskan pesan tersebut kepada para tetangganya. Pada saat evaluasi pertama dilakukan pada tahun 1971, komunikasi personal mencapai dua per tiga rumah tangga yang disurvei.
- Penilaian yang baik, pujian dan penghargaan terhadap acara sesame street mengalir dari berbagai kalangan sejak 1970. Dukungan yang luas diberikan demikian halnya dengan dukungan dana. Pada tahun 1972, sesame street memiliki reputasi yang sangat baik sebagai tayangan yang populer. Kesuksesan "sesame street" menunjukkan bahwa TV dapat digunakan sebagai teknologi instruksi massa untuk peningkatan kualitas pendidikan.

2. Pilihan Aksi Perempuan Bangun Budaya Antikorupsi

Pengetahuan Perlu dikuasai Perempuan sebagai Edukator

Sebagai edukator, perempuan perlu menguasai materi dasar terkait. Materi yang disiapkan minimal dapat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

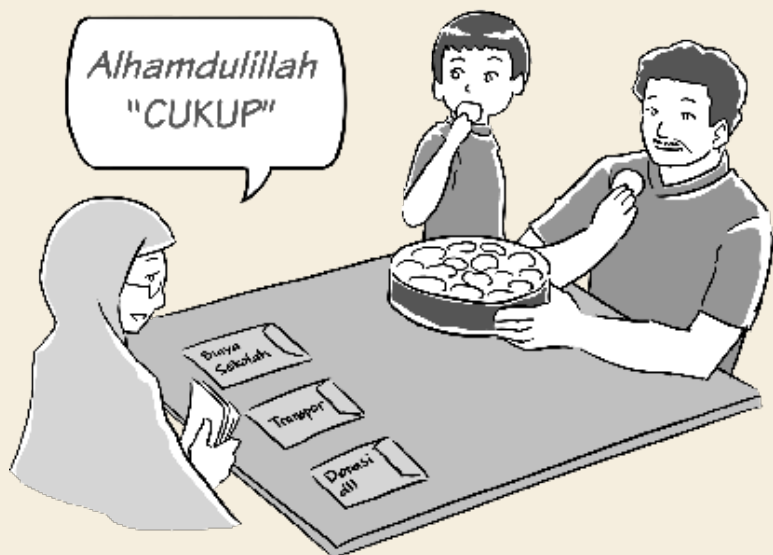
- Apa yang dimaksud korupsi?
- Apa saja bentuk korupsi?
- Berapa besar dan dalam hal apa saja kerugian akibat korupsi?
- Apa manfaat jika tidak ada korupsi?
- Apa itu pemberantasan korupsi?
- Apa saja strategi pemberantasan korupsi?
- Mengapa masyarakat perlu terlibat dalam pemberantasan korupsi?
- Apa saja nilai antikorupsi?
- Bagaimana menginternalisasikan nilai antikorupsi?
- Mengapa gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif harus dihindari?
- Mengapa perempuan perlu berperan aktif dalam pemberantasan korupsi?
- Perempuan dapat berperan apa saja dalam pemberantasan korupsi?
- Apa yang dimaksud dengan pribadi perempuan yang berintegritas?
- Mengapa perempuan perlu membangun kemuliaan dan integritas dirinya?
- Apa saja yang perlu dilakukan seorang istri untuk mencegah suami melakukan korupsi? untuk mendorong suami berperan serta dalam pemberantasan korupsi?
- Apa saja yang perlu dilakukan seorang ibu untuk mendidik anak antikorupsi?
- Bagaimana mekanisme yang perlu dipahami dalam menginternalisasikan budaya antikorupsi di lingkungan pertetanggaan, tempat kerja, dan organisasi/lembaga yang diikuti perempuan?
- Apa saja indikator antikorupsi di keluarga, masyarakat, dan publik?
- Apa saja tips-tips praktis yang mendukung budaya antikorupsi?

Sikap dan Keterampilan Dasar Yang Dibutuhkan Perempuan

Perempuan yang memiliki semangat menginisiasi suatu kegiatan (sebagai inisiator) dan/atau memotivasi banyak pihak (sebagai motivator), dan/atau memfasilitasi suatu aksi atau program (sebagai fasilitator), dan/atau mengadvokasi kebijakan dan program di berbagai lembaga/organisasi (sebagai advokator), memerlukan keterampilan mengenai:

1. Kepemimpinan dasar
2. Manajemen bersifat umum
3. Manajemen waktu
4. Manajemen konflik
5. Manajemen stres
6. Komunikasi
7. Berargumentasi advokasi
8. Negosiasi
9. Pengambilan keputusan
10. Kelembagaan dan organisasi





Pilihan Aksi Perempuan Sebagai Edukator Antikorupsi

Aksi sebagai edukator yang berlaku di semua tingkatan dan lingkungan tempat perempuan berada:

- Aturan dan nilai keluarga
- Prinsip Internalisasi nilai kejujuran dan integritas
- Tips bangun atmosfer kesyukuran
- Tips bangun atmosfer kesederhanaan
- Tips bangun atmosfer kecukupan
- Tips internalisasi nilai kesederhanaan
- Non-materialistik & hedonis
- Non-konsumtif
- Bahan pendidikan keluarga antikorupsi
- Bahan pendidikan keluarga: literasi keuangan keluarga
- Bahan pendidikan keluarga: kerentanan dan potensi risiko keluarga

Pilihan aksi sebagai inisiator, motivator, fasilitator, advokator

Perempuan sebagai inisiator, motivator, fasilitator pelatihan, focus group discussion, kampanye melalui berbagai media, terkait:

- Kampanye sosial dengan menggunakan strategi pemasaran sosial, dengan tema:
 - » “Perempuan berintegritas dan mulia”
 - » “Budaya antikorupsi”
 - » “Kampung antikorupsi”
- Diskusi terarah metode efektif penanaman nilai antikorupsi
- Diskusi terarah meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan
- Pelatihan konsumen bijak dan cerdas
- Pelatihan literasi dan pengelolaan keuangan
- Pelatihan mendongeng “gali kekuatan cerita” tokoh antikorupsi
- Lomba menulis esai bagi siswa, mahasiswa, dan kalangan umum
- Lomba pidato via medsos (Youtube, IG, Facebook)
- Workshop penyusunan substansi kampanye antikorupsi
- Workshop penyusunan buku saku antikorupsi bagi konselor sebaya





Contoh Aksi

Membuat twibbon di media sosial mengajak kepada perempuan agar berani melaporkan tindak pidana korupsi



Contoh Aksi

Membuat meme di media sosial sebagai bagian kampanye “perempuan mulia dan berintegritas”

**Contoh Aksi**

Menyusun meme di media sosial sebagai bagian kampanye “budaya antikorupsi di keluarga”

Contoh Aksi
Pelatihan Menggali
Kekuatan Cerita

Panduan Pelatihan “Gali Kekuatan Cerita”¹⁷ Menanamkan Nilai Antikorupsi Kepada Anak Sejak Dini

Pengantar

Cerita bisa sangat menggugah dan melibatkan emosi, mempengaruhi perilaku, dan menentukan pengambilan keputusan seseorang manakala disampaikan dengan efektif. Cerita dapat digunakan sebagai salah satu metode sosialisasi karakter kepada anak sejak dini dengan kekuatan cerita saat mensosialisasikan antikorupsi dapat tergali melalui serangkaian kegiatan yang mengarahkan anak untuk melakukan perilaku berkarakter dan menanamkan konsep diri positif yang terdapat pada 9 nilai antikorupsi antara lain: Jujur, Peduli, Disiplin, Mandiri, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani, dan Adil.

¹⁷ Sunarti E. 2005. Gali Kekuatan Cerita. Panduan Pendidikan Karakter Anak Sejak Dini di Keluarga Melalui Cerita. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Tujuan internalisasi antikorupsi melalui penggalan kekuatan cerita

1. Menanamkan tokoh tersembunyi 'hidden model' yang meneladani 9 nilai antikorupsi kepada anak. Sang tokoh yang identik atau secara kuat mempresentasikan karakter tertentu. Dengan harapan dapat memberikan kekuatan arahan dan panduan perilaku karakter anak sehari-hari.
2. Meningkatkan kemampuan eksplorasi anak melalui pencarian contoh lain seperti karakter tokoh cerita, dalam kehidupan sehari-hari.
3. Membangun kemampuan analisis dan keterampilan pemecahan masalah berkaitan dengan perilaku berkarakter.
4. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengimplementasikan konsep karakter dalam kehidupan sehari-hari. Anak diharapkan dapat menunjukkan secara nyata konsep dan perbuatan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari.
5. Membangun kemampuan analisis dan evaluasi manfaat perilaku berkarakter dan dampak negatif perilaku tidak berkarakter, serta menarik kesimpulan terhadap hasil analisis.
6. Menampakan konsep diri positif melalui kekuatan kalimat afirmatif.

Petunjuk bercerita

1. Pahami karakter yang ditanamkan pada anak.
2. Kembangkan pandangan positif, seperti rasa bangga dan hormat pada tokoh yang ingin disosialisasikan.
3. Baca cerita terlebih dahulu sehingga memahami alur, makna, dan tujuan bercerita.
4. Temukan bagian cerita yang perlu mendapat penekanan.
5. Bangun suasana seakan-akan apa yang diceritakan tampak di depan mata.
6. Hidupkan tokoh cerita melalui pengulangan kebiasaan dan penguatan watak tokoh.
7. Siapkan mental anak dan beri kesan bahwa kegiatan ini sangat spesial dan orang tua merasa senang melakukannya.

Suplemen cerita-1



Pernah mendengar
sosok Jaksa
yang sederhana?
Namanya
Baharuddin Lopa,
akrab di panggil
Lopa. Baharuddin
Lopa ini adalah
cucu dari Raja
Balangnipa.
Kakeknya
salah satu raja
terpandang
di daerah
Mandar yang
terkenal dengan
kesederhanaannya.

Tokoh Nasional Sang Idola, Baharuddin Lopa

Ya.. walaupun raja dia tetap hidup sederhana. Sifat ini tentunya menurun kepada Lopa. Lopa yang besar di Sulawesi Barat itu, dikenal berprestasi sejak usia muda. Bagaimana tidak? Saat usianya baru 23 tahun dan masih menjadi mahasiswa hukum di Universitas Hassanudin, Lopa telah berkarier sebagai jaksa di Kajari Makassar pada tahun 1958. Kemudian, di usianya yang baru 25 tahun ia dilantik menjadi Bupati Majene. Selang dua tahun, Lopa lantas menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di sejumlah wilayah, mulai dari Ternate, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta, hingga menjadi Jaksa Agung walaupun dengan masa jabatan yang singkat karena pria berkacamata itu menghembuskan napas terakhirnya pada Juli 2001.

Lopa menikah dengan Indrawulan Majid Tongai. Sang Istri paham betul dengan sosok suaminya Lopa yang tegas dan patuh terhadap hukum. Sebagai istri yang baik, Indrawulan selalu berusaha keras untuk dapat mengikuti Lopa, mendukung dan mendoakan dalam tugasnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Indrawulan Majid Tongai sebagai istri sangat menghormati sosok Lopa, mereka hidup saling menghargai dan saling mengasihi satu sama lain. Kesederhanaan Lopa dan istri tentu ditularkan anak dan keluarganya. Salah satu contohnya selama menjabat menjadi Kajati Sulsel, Indrawulan Majid Tongai istrinya saat itu selalu naik bus bila pulang ke Majene.

Padahal saat itu semestinya Indrawulan diantar oleh kendaraan dinas. Aturan ini memang berlaku untuk semua anggota keluarganya, yakni tak boleh diantar oleh kendaraan dinas.

Suatu Minggu di tahun 1983, Lopa yang masih menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diundang menjadi saksi pernikahan di sekitar Makassar. Riri Amin Daud sang tuan rumah beserta kerabatnya menunggu kedatangan Lopa. "Di mana Lopa?" kata Riri. "Kita tunggu saja kedatangan mobil dinas berplat DD-3", saut kerabatnya. Setelah sekian lama menunggu di depan rumah, namun mobil dinas itu tak kunjung datang. Apa yang terjadi? Suara Lopa dan istri sudah terdengar dari dalam rumah, ternyata Lopa bersama istrinya datang dengan naik angkot, yang oleh orang Makassar disebut *pete-pete*. Dengan rendah hati Lopa menyampaikan "Ini kan hari minggu, dan bukan acara dinas, haram hukumnya saya menggunakan mobil dinas". Senyum semringah jawaban dari Riri sang tuan rumah.

Tak hanya itu, ternyata telepon dinas yang ada di rumahnya selalu Lopa kunci. Lopa melarang siapa pun di rumahnya memakainya. Untuk itu, Lopa sampai memasang telepon koin di rumah jabatannya, agar tidak campur aduk kepentingan pribadi dan dinas. Begitulah kesederhanaan dan kejujuran Lopa mengemban amanah sebagai penegak hukum. Ia menjadi salah satu sosok yang begitu dirindukan, di tengah banyaknya jaksa yang terlibat kasus hukum di tanah air.

Lopa terpilih sebagai tokoh antikorupsi karena telah bekerja dan berjuang untuk melawan ketidakadilan dengan memberantas korupsi di Indonesia tanpa putus asa selama lebih dari 20 tahun. Jujur dan berani adalah dua sikap yang harus dimiliki seorang Jaksa. "Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan! Jangan takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum!". Petikan kalimat tersebut keluar dari seorang Baharuddin Lopa.

Di tengah pemberitaan kasus-kasus korupsi yang merajalela di media massa saat ini, nama Baharuddin Lopa akan selalu dikenang dan dirindukan sebagai jaksa yang amanah dan berintegritas. Mari kita meneladani keberanian, kejujuran, dan kesederhanaannya. Semoga kelak generasi penerus bangsa lainnya banyak yang meneruskan jejak perubahan Baharuddin Lopa.

Suplemen cerita-2

Bung Hatta,
Sang Proklamator



Bung Hatta sang proklamator dan wakil Presiden pertama Negara Republik Indonesia, dikenal sebagai sosok jujur, kerakyatan, memegang amanat, tidak haus kekuasaan, demokratis dan berjuang untuk tegaknya demokrasi ekonomi.

Bung Hatta menikah dengan Rahmi Rachim atau biasa akrab di panggil Yuke. Meskipun terpaut usia 24 tahun. Mendampingi Bung Hatta juga berarti Rahmi telah siap mengikuti gaya hidup sang proklamator yang lebih mementingkan kepentingan negara ketimbang urusan keluarga. Karena itu, sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi Rahmi kala menyaksikan penolakan Bung Hatta terhadap segala fasilitas yang dinilai bermewah-mewahan dan hanya menguntungkan diri sendiri serta keluarga.

Bung Hatta lahir dan terbiasa hidup sederhana. Gajinya sebagai wakil presiden pada saat itu selalu habis digunakan untuk membeli buku. Dia tidak pernah mengambil uang yang bukan haknya. Bahkan Bung Hatta pernah menyuruh asistennya mengembalikan dana taktis wakil presiden. Padahal jika tidak dikembalikan pun tidak akan menjadi masalah karena dana taktis itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Tetapi Bung Hatta bersikeras untuk mengembalikan dana taktis tersebut.

Ada kisah menarik tentang bagaimana Bung Hatta menjaga rahasia negara dari keluarganya yang berimbas pada sang istri, Rahmi gagal membeli mesin jahit. Bung Hatta merahasiakan rencana pemerintah melakukan senering (penyederhanaan mata uang rupiah) kepada keluarganya. Ceritanya, Rachmi istri dari Bung Hatta tiap bulan menyisihkan uang belanja untuk ditabung. Rencananya, andai jika uangnya sudah terkumpul akan dipakai untuk membeli mesin jahit. Tak disangka, saat uang sudah terkumpul tiba-tiba pemerintah saat itu mengumumkan kebijakan pemotongan nilai mata uang rupiah, Rp1.000 menjadi Rp1. Rachmi pun tak mampu membeli mesin jahit idamannya. Bung Hatta pun hanya bisa menyuruh Rachmi bersabar dan menabung lagi.

Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden tahun 1956 dan kembali menjalani kehidupan seperti masyarakat lain pada umumnya. Kisah Bung Hatta dan Rahmi hendaknya menjadi teladan berharga yaitu sikap mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan, sikap menahan diri dari meminta hibah, bersahaja dan membatasi konsumsi sesuai kemampuan.

Suplemen cerita-3

Sederhana
tapi Percaya Diri

Siapa yang tidak mengenal Mohammad Natsir? Beliau seorang ulama, politikus, pejuang kemerdekaan, dan pernah menjabat menteri bahkan Perdana Menteri Indonesia. Di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim Dunia (World Muslim League) dan ketua Dewan Masjid se-Dunia.

Semasa hidupnya kontribusi Natsir kepada negara pasca-kemerdekaan sangatlah besar. Jabatan berlimpah tidak membuat Natsir hidup bergelimang kemewahan. Natsir lebih memilih hidup sederhana dan apa adanya. Tentang hal ini, ada satu cerita pada saat Natsir memenuhi acara pertemuan dengan George McTurnan Kahin akrab dipanggil dengan Mr Kahin seorang guru besar Universitas Cornell di Amerika Serikat. Pada saat acara pertemuan Natsir mengenakan kemeja yang terdapat tambalan kain karena sobek pada bagian lengan sebelah kiri atas. Sontak baju yang dikenakan Natsir menjadi pusat perhatian.

"Mohon maaf Mr, dari tadi saya memperhatikan baju yang dikenakan Mr sepertinya ada perbedaan pada lengan baju Mr antara lengan baju kanan dan kiri, sebelah kiri seperti ada bekas jahitan atau memang model bajunya seperti itu Mr?" Tiba-tiba Mr Kahin bertanya kepada Mohammad Natsir sambil tersenyum.

Seketika mata semua orang yang berada di meja yang sama memperhatikan baju lengan kiri Mohammad Natsir. Sesungguhnya, sedari tadi pun sudah banyak orang yang memperhatikannya namun tidak ada yang berani bertanya kepada Mohammad Natsir karena takut menyinggung perasaan beliau.

"Ha ha, ya Mr Kahin! Ini sengaja kemarin baju saya ditambal oleh istri saya karena lengan sebelah kiri ini sobek dan harus dijahit!" Jawab Mohammad Natsir sambil memperlihatkan baju lengan sebelah kiri, sehingga terlihat jelas tambalan bajunya.

"Kenapa Mr tidak membeli baju baru saja? Apakah gaji yang diberikan oleh Negara kepada Mr sebagai Menteri Penerangan tidak cukup untuk membeli baju?" Tanya Mr Kahin dengan sangat serius.

Dengan nada yang lembut dan tersenyum santai Mohammad Natsir menjawab tanpa beban. "Gaji yang diberikan oleh Negara kepada saya sudah cukup Mr Kahin. Bahkan menurut saya lebih dari cukup." "Selagi baju ini masih dapat digunakan, kenapa saya harus beli baju yang baru? kan fungsi baju juga sama, sama-sama dipakai!"

"Apakah Mr tidak malu mengenakan baju yang bertambal seperti itu? Sementara teman-teman Mr ini mengenakan baju bagus-bagus sekali." Tanya Mr Kahin.

"Kenapa saya harus malu? Kemeja yang saya kenakan ini bukan hasil dari mencuri, korupsi atau mengambil hak orang lain. Saya lebih senang menggunakan uang saya untuk ditabung saja dan digunakan untuk kepetingan yang lebih penting daripada membeli sebuah baju yang fungsinya sama sebagai penutup badan." Jawab Natsir dengan lembut.

Dia lah Mohammad Natsir pernah menjabat Perdana Menteri Indonesia, namun hidupnya sederhana tetapi tetap percaya diri dan tidak merasa malu dengan kesederhanaannya.

KANAL PENGADUAN

 Surat:

Direktorat Pelayanan
Laporan dan Pengaduan
Masyarakat, Gedung Merah
Putih KPK Jl. Kuningan
Persada Kav. 4, Setiabudi,
Jakarta 12950

 Call Center KPK:

198

 PO BOX 575

Jakarta 10120

 SMS:

08558575575

 Whatsapp:

0811959575

 E-mail:

pengaduan@kpk.go.id

 **KPK Whistleblower
System:**

<http://kws.kpk.go.id>



REFERENSI PERATURAN

Kumpulan Undang-Undang TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT



Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi,
Jakarta 12950